

**PENGARUH PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN  
PEMBINAAN OPERASI PASAR KHUSUS BERAS  
TERHADAP MOTIVASI PENDUDUK UNTUK  
MENANGGULANGI KEMISKINAN  
DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Diajukan Oleh :

**KRISTANTO  
D4E00010**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGARUH PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN OPERASI PASAR KHUSUS BERAS TERHADAP MOTIVASI PENDUDUK UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

dipersiapkan dan disusun oleh

**KRISTANTO**

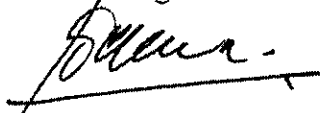
NIM : D4E000097

telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 2 April 2002

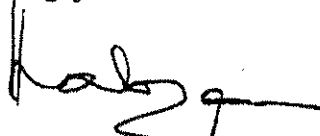
#### Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



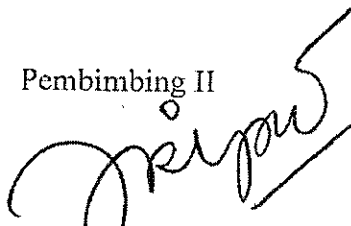
Prof.Drs.Y.WARELLA, MPA,Ph.D

Penguji I



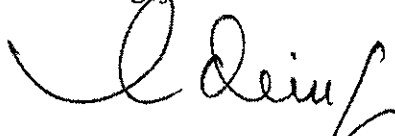
Prof. Drs. HARTOJO

Pembimbing II



Dr. ARI PRADHANAWATI, MS

Penguji II

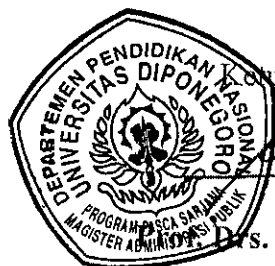


Drs. EDI SANTOSO, SU

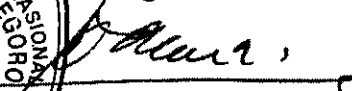
Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh Magister Sains

Tanggal 14 - April 2002



Ketua Program Studi MAP



Dr. Y. WARELLA, MPA, Ph.D

## PERNYATAAN

Derigan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 April 2002

  
KRISTANTO

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang Peranan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan serta respon masyarakat terhadap program Pemerintah melalui Operasi Pasar Khusus Beras. Data diperoleh dari riset kepustakaan (*library research*) dan wawancara mendalam (*deep interview*) dengan penerima manfaat dan institusi yang bertindak sebagai pelaksana program OPK Beras di Kota Semarang. Berbagai fenomena yang muncul diinterpretasikan serta dianalisis secara diskriptif-kuantitatif yang disertai dengan pendekatan “sosiologis”.

Berdasarkan data yang telah diambil, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui OPK Beras dapat membantu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan/rawan pangan. Setiap penerima manfaat OPK bisa membeli beras dengan harga Rp. 1000,-/kg dengan jumlah minimal 10 kg maksimal 20 kg setiap bulan.

Sedangkan aspirasi masyarakat terhadap program pemerintah melalui OPK Beras sangat mendukung. Karena dengan program OPK Beras keluarga miskin/rawan pangan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan ditingkat keluarga melalui pembelian beras yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah. Dengan mengasumsikan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, maka menjadi kewajiban negara untuk menekan angka kemiskinan. Atau lebih tepatnya negara bertanggung jawab akan kesejahteraan penduduknya.

Kata Kunci :

- Kemiskinan
- Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras
- Pemerintah

## **ABSTRACT**

This study is aimed at explaining the role of the Indonesian government in reducing poverty and the people's responses on the implementation of the government' program of Rice-Specific Market Operation (OPKB). The data are collected from library research and deep interview with the benefit receivers of the program and from the institutions in charge of the program in Semarang City, which is the location of this research. Several arising phenomena are then interpreted and then described quantitatively using sociological approach.

Based on the collected data, the conclusion has been made that the government, through the program of OPKB, has played an important role in lifting up the poor from poverty. Every receiver of the OPKB program may buy as many rice as ten to twenty kilograms at the price of Rp. 1000,- per kilogram.

Based on the data which have been collected it is revealed that the people have given great support to the program. It is proved that through this program the poor can afford to suffice their basic need, and therefore they can maintain their food defend at least at the family level by buying rice at the lower price, the price subsidized by the government. Assuming that the state is responsible for the people's welfare, it is obvious that one of the government's the responsibilities is reducing poverty.

Key words :

Poverty

Rice-Specific Market Operation (OPKB)

Government

## KATA PENGANTAR

Pada saat selesainya penulisan Tesis ini dengan judul: "Pengaruh Perumusan Kebijakan Dan Pembinaan OPKB Terhadap Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Semarang" kiranya tiada kata yang paling layak diucapkan kecuali hanyalah ucapan syukur "Alhamdulillah" ke hadirat Allah SWT karena berkat ridha-Nyalah Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S-2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Konsentrasi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, sebab penulis mempunyai anggapan "Segala sesuatu bilamana telah selesai maka tampaklah kekurangannya". Untuk itu penulis mengharap saran-saran bermanfaat dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Dan pada kesempatan baik ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D., Pembimbing I yang telah memberi bimbingan hingga terselesainya tesis ini.
2. Ibu Dr. Ari Pradhanawati, MS. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaiannya tesis ini.
4. Di samping itu, secara khusus ucapan terimakasih Penulis tujukan kepada Ibunda dan Ayahanda yang sangat amat banyak jasanya, sehingga penulis tidak mampu mewujudkan dalam bentuk kata, jasa-jasa beliau pada Penulis. Tidak lupa

pentingnya, Penulis ucapkan terimakasih kepada Istri tercinta Hj. Siti Muslimah Purwani yang sangat banyak sekali membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dan juga kepada kedua Ananda tersayang : Bunga Erika Kurniawati Kristanto dan Yuliana Kristanto yang memberikan semangat dalam kehidupan ini.

Ucapan terimakasih kehadlirat Allah SWT merupakan suatu kewajiban bagi penulis, mengingat berterima kasih kepada sesama manusia itu adalah jalan menuju kepada Allah. Sedangkan syukur kepada Allah merupakan kewajiban mutlak. Semoga jasa-jasa para hamba Allah SWT tersebut mendapat balasan yang banyak dari-Nya.

Akhirnya, semoga Tesis ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah bagi penulis. Amin .... Amin.... Amin.

Semarang,                      Maret 2002

Penulis,

Kristanto

*“Sesungguhnya telah kami sediakan untuk penghuni neraka itu banyak jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi mereka tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat, menghayati tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka orang-orang yang alpa”.*

*(Al-A'Raaf:348)*

Karya ini Kupersembahkan :

1. Ibunda dan Ayahnda tercinta
2. Istriku tercinta Hj.Siti Muslimah Purwanni. yang selalu setia mendampingi
3. Kedua Ananda tercinta : Bunga Erika Kurniawati Kristanto dan Yuliana Kristanto, mudah-mudahan mengikuti langkah Ayahanda.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
INTISARI .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Kegunaan Penelitian .....	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 19
A. Landasan Teori .....	17
1. Perumusan Kebijakan .....	19
2. Pemerintah .....	21
3. Motivasi .....	23
4. Pembinaan .....	25
5. Kemiskinan .....	26
6. Operasi Pasar Khusus Beras (OPKB) .....	31
B. Hipotesis .....	32
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 34
A. Rancangan Penelitian / Pendekatan Penelitian .....	34
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Variabel Penelitian .....	35
E. Definisi Konseptual .....	36
F. Definisi Operasional .....	38

G. Teknik Pengumpulan Data .....	40
H. Sumber Data .....	41
I. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	41
J. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	44
K. Jadwal Kegiatan .....	50
 BAB IV TINJAUAN UMUM KOTA SEMARANG PROGRAM OPKB.....	51
A. Tinjauan Umum Kota Semarang .....	51
1. Kondisi Geografis .....	53
2. Kondisi Sosial Ekonomi .....	54
B. Program Penanggulangan Dampak Pengangguran Subsidi Energi (PPD-PSE) Bidang Pangan .....	55
 BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....	56
A. Analisis Proporsi .....	56
B. Analisis Tabulasi Silang .....	70
C. Analisis Uji Hipotesis .....	82
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran-saran .....	96
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR PERTANYAAN	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Desa Tertinggal menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Desa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1995 .....	Lamp
Tabel 1.2	Data Keluarga Miskin di Jawa Tengah Tahun 2000 .....	Lamp
Tabel 1.3	Perolehan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) .....	9
Tabel 5.1	Tingkat Perhatian Pemerintah Terhadap Kebutuhan Pokok .....	56
Tabel 5.2	Tingkat Perhatian Pemerintah Terhadap Hubungan Dengan Masyarakat. ....	57
Tabel 5.3	Tingkat Pemberian Faktor Pendorong Untuk Menanggulangi Kemiskinan .....	58
Tabel 5.4	Tingkat Kemampuan Pemerintah Dalam Memecahkan Masalah ...	58
Tabel 5.5	Tingkat Keluasan Pandang Sosial Terhadap Pemerintah .....	59
Tabel 5.6	Tingkat Pemberian Informasi Tentang Program Kemiskinan Oleh Pemerintah .....	59
Tabel 5.7	Bentuk-Bentuk Pembinaan .....	59
Tabel 5.8	Frekuensi Pembinaan .....	61
Tabel 5.9	Teknik-Teknik Pembinaan .....	61
Tabel 5.10	Tingkat Ketepatan/Keteraturan Waktu Bina manusia .....	62
Tabel 5.11	Bentuk-Bentuk Pembinaan .....	62
Tabel 5.12	Tingkat Ketepatan/Keteraturan Waktu Pembinaan .....	63
Tabel 5.13	Tingkat Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Program .....	63
Tabel 5.14	Tingkat Kemauan Petugas Dalam Melakukan Pembinaan .....	64
Tabel 5.15	Tanggapan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Bina Usaha .....	65
Tabel 5.16	Tingkat Keinginan Penduduk Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga .....	65
Tabel 5.17	Pemerintah Dalam Memberi Binaan .....	66
Tabel 5.18	Tingkat Keyakinan Responden Dengan Mengikuti Program Penanggulangan Kemiskinan Akan Meningkatkan Pendapatan Keluarga .....	67
Tabel 5.19	Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga ...	67
Tabel 5.20	Tingkat Keyakinan Penduduk Akan Berhasil Dalam Suatu Usaha Dengan Pinjaman Modal .....	68

Tabel 5.21	Tanggapan Penduduk Apabila Mendapat Pinjaman Modal Usaha	69
Tabel 5.22	Manfaat yang Dirasakan Penduduk dalam Mengikuti Program Penanggulangan Kemiskinan	69
Tabel 5.23	Hubungan Tingkat Perhatian Pemerintah Mengenai Program Operasi Pasar Khusus Beras (OPKB) Dengan Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi Kemiskinan	70
Tabel 5.24	Hubungan Pemberian Dorongan oleh Pemerintah dengan Keyakinan Responden dengan Mengikuti Penanggulangan Kemiskinan akan Meningkatkan Pendapatan Keluarga	71
Tabel 5.25	Hubungan Pelaksanaan Bina Manusia Dengan Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi Kemiskinan	73
Tabel 5.26	Hubungan Bentuk-Bentuk Bina Usaha Dengan Keyakinan Responden Dengan Menanggulangi Kemiskinan Akan Meningkatkan Pendapatan Keluarga	74
Tabel 5.27	Hubungan Bentuk-Bentuk Bina Usaha Dengan Keyakinan Responden Akan Berhasil Dalam Suatu Usaha	75
Tabel 5.28	Hubungan Tingkat Perhatian Pemerintah Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Tanggapan Responden Terhadap Pembinaan OPKB Dengan Keinginan Penduduk Untuk Menanggulangi Kemiskinan	77
Tabel 5.29	Hubungan Tingkat Pemberian Dorongan Oleh Pemerintah Dan Bentuk-Bentuk Pembinaan Terhadap Keyakinan Responden Akan Peningkatan Pendapatan Keluarga	80

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara geografis dan klimatologis merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dengan garis pantai yang terluas didunia, iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, hutan dan kandungan bumi yang sangat kaya, merupakan bahan (*ingredient*) yang utama untuk membuat negara Indonesia menjadi negara yang kaya. Suatu perencanaan yang bagus yang mampu memanfaatkan semua bahan baku tersebut secara optimal, akan mampu mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang makmur. Ini terlihat pada hasil Pelita III s/d Pelita V yang dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% - 7% membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk yang tertinggi di dunia. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat julukan "*Macan Asia*".

Namun ternyata semua pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup berarti pada usaha pengentaskan kemiskinan. Pola kemiskinan di Indonesia selama 16 tahun tidak nampak mengalami penurunan. Kalau Gini Ratio dijadikan sebagai indikator kemiskinan yang dominan, maka selama 30 tahun Gini Ratio Indonesia hanya turun 0,07 atau 7%. Kenyataan ini yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama (misal: Malaysia, Thailand, Philipina), yaitu tingkat Gini Ratio menunjukkan tingkat penurunan yang cukup berarti.

Beberapa studi empiris, dengan pendekatan time series yang bersifat *cross-section study* memberikan kesimpulan yang beragam. Deinenger dan Squire (1995, 1996) menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu

negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Namun study yang dilakukan oleh World Bank (1990), Fields dan Jakobson (1989) dan Ravallin (1995), menunjukkan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Kajian kajian empiris tersebut pada hakekatnya adalah menguji hipotesis Kuznets di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama *kurva U terbalik dari kuznets*. Maka kedua studi yang mempunyai hasil bertolak belakang tersebut, justru menguatkan hipotesis dari kuznets dengan kurva U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif kemudian menjadi negatif, menunjukkan terjadinya proses evaluasi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (*rural*) ke suatu ekonomi perkotaan (*urban*) atau ekonomi industri.

Akan tetapi di Indonesia pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang tinggi tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan yang signifikan. Di Indonesia juga terdapat korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin yang semakin tinggi.

Data Sensus 1999 yang dikeluarkan BPS, menyebutkan tidak kurang 47.97 juta penduduk Indonesia masih dibawah garis kemiskinan atau sebesar 23,43 % dari jumlah penduduk Indonesia. Kelompok penduduk ini amat rentang terhadap ketahanan pangan, baik karena dampak krisis ekonomi maupun kenaikan harga BBM.

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang semakin banyak tersebut, perlu adanya strategi penanggulangannya. Oleh Mubyarto secara umum dapat dirumuskan : *Pertama*, mempercepat potensi ekonomi lapisan bawah masyarakat dan

mendorong agar potensi itu dipercepat perkembangannya. Untuk itulah diluncurkan program-program penanggulangan kemiskinan yang sejak awal PJP I terwujud dalam berbagai bentuk, khususnya dalam bentuk program-program Inpres (Inpres Bantuan Desa, Inpres Sekolah Dasar, Inpres Kesehatan, Inpres Desa Tertinggal, dan lain-lain). *Kedua*, Mengembangkan ekonomi rakyat dengan melindungi rakyat dari persaingan tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi kuat atas yang lemah. Upaya untuk melindungi ekonomi rakyat tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat bawah secara menyeluruh. *Ketiga*, mendorong terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia melalui berbagai perangkat kebijakan di bidang keuangan sehingga dapat muncul lebih banyak bank-bank perkreditan rakyat yang melayani lapisan bawah masyarakat.

#### **Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)**

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dituangkan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 1993 merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan salah satu strategi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan sekaligus meningkatkan pemerataan, yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 1994. Program IDT lahir dari konteks kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Indonesia yang diakui cenderung makin melebar pada akhir Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I). Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi itu dianggap sudah mencapai tahap merisaukan yang jika dibiarkan akan dapat berkembang ke arah keangkuhan dan kecemburuan sosial. Hal ini secara eksplisit dinyatakan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993.

Konstalisasi rakyat melalui MPR ini merupakan pegangan dasar bagi pemerintah untuk menyusun suatu program nasional penanggulangan kemiskinan. Ketimpangan

ekonomi muncul bukan karena ada kemandekan pembangunan, tetapi justru karena berhasilnya pembangunan ekonomi. Dalam proses mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi seperti sebelum krisis ekonomi tahun 1997, merupakan akses berbagai lapisan masyarakat kepada sumber-sumber daya pembangunan tidak merata, bahkan akses itu cenderung terkonsentrasi pada sekelompok kecil anggota masyarakat.

Peluncuran program-program penanggulangan kemiskinan dan sekaligus program pemerataan melalui berbagai program Inpres selama PJP I merupakan bagian dari strategi umum pengurangan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Pada prinsipnya, pengurangan ketimpangan ekonomi dilakukan bukan dengan mengerem pertumbuhan kelompok-kelompok yang sudah maju ekonominya, melainkan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini masih tertinggal.

Program IDT sebagai langkah pemberdayaan yang langsung menimbulkan efek peningkatan pendapatan masyarakat lapisan bawah adalah pemberian modal kerja langsung kepada penduduk miskin itu sendiri. Dana yang disalurkan berkisar antara Rp 20 juta sampai Rp 60 juta untuk setiap desa tertinggal yang jumlah seluruhnya pada tahun ketiga (1996/1997) mencapai 28.223 buah atau 44% dari seluruh desa Indonesia.

Dana program ini mulai disalurkan pada tahun anggaran 1994/1995 kepada 20.633 desa tertinggal, tahun kedua (1995/1996) sebanyak 22.094 desa tertinggal, dan tahun ketiga (1996/1997) sejumlah 22.054 buah desa tertinggal. Penduduk miskin berkelompok menjadi pokmas (kelompok masyarakat) dengan anggota sekitar 30 KK untuk setiap pokmas. Jika di suatu desa terdapat 100 KK miskin, maka dibentuk 3 atau 4 pokmas, terserah kesepakatan penduduk miskin itu sendiri. Dana IDT dibagi diantara kelompok-kelompok tersebut sesuai hasil musyawarah penduduk miskin.



Filosofi program IDT adalah mempercayai penduduk miskin untuk memanfaatkan dana IDT seefisien dan seefektif mungkin untuk tujuan-tujuan produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Hasil yang tercapai setelah program ini berjalan tiga tahun sangat menggembirakan. Dari desa-desa IDT dilaporkan berbagai perkembangan yang membesarkan hati. Ada anggota pokmas dari NTT melaporkan kenaikan pendapatannya sebesar 500% setelah memanfaatkan dana IDT. Dari pulau Enggano dilaporkan bahwa lahan persawahan yang dibuka dengan biaya dari dana IDT telah memberikan hasil 4 ton gabah kering punggut per hektar, sehingga kebutuhan beras penduduk tercukupi. Para petani dari tanah Toraja, Sulawesi Selatan, melaporkan telah memperoleh panen kentang dan bawang di atas lahan yang selama ini merupakan lahan tidur dan baru dimanfaatkan setelah masuknya program IDT.

Program IDT juga secara perlahan-lahan tetapi pasti membawa perubahan di dalam wawasan dan sikap aparat pemerintah. Pendekatan aparat yang selama ini cenderung "memberi" mulai berubah menjadi "membina" dan "memberdayakan". Aparat pemerintah tidak lagi merasa paling tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, karena disadari bahwa masyarakat memang lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan. Pemantauan pelaksanaan program IDT di desa-desa tertinggal oleh pejabat pemerintah dari pusat atau daerah memungkinkan mereka dapat berdiskusi dengan penduduk miskin tentang keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan mereka dalam pelaksanaan program IDT. Para pejabat tidak lagi begitu mudah menyatakan faktor-faktor apa saja penyebab keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program ini, melainkan pertama-tama mendengarkan dari masyarakat berbagai masukan yang ingin mereka sampaikan agar program ini lebih berhasil.

Pada tahun pertama pelaksanaan program IDT menggunakan pendekatan *top down*, tetapi sebagian pelaksanaannya gagal. Setelah memasuki tahun kedua pelaksanaan program IDT, aparat pemerintah daerah menyadari bahwa penentuan jenis usaha dari atas akan lebih besar kemungkinannya gagal daripada berhasil. Ketika diserahkan kepada penduduk di desa itu untuk memilih jenis usaha sendiri, ternyata mereka lebih suka meneruskan jenis usaha yang selama ini mereka tekuni seperti menangkap ikan di sungai dan mengumpulkan rotan di hutan. Dana IDT mereka gunakan untuk membeli jaring, pukat, pancing, dan berbagai alat penangkapan ikan yang diperlukan, dan yang paling sesuai dengan jangkauan modal yang diperoleh. Hasilnya, penduduk miskin mulai dapat mengembalik modal usaha yang untuk seterusnya dapat digulirkan kepada anggota lain yang memerlukan, atau mereka meminjam lagi setelah pinjamannya lunas. Dana IDT diterima pokmas sebagai hibah dari pemerintah namun pokmas meneruskannya kepada anggotanya sebagai pinjaman. Dana ini sudah menjadi modal usaha yang abadi dan dikelola oleh pokmas sesuai sistem dan mekanisme yang disepakati oleh para anggota.

Dalam rangka program IDT ditempatkan sekitar 4.000 tenaga sarjana pendamping “sukarela” di seluruh Indonesia untuk membantu penduduk miskin dalam merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan. Para pendamping ini ditempatkan di desa-desa yang paling parah kondisi keterisolasiannya. Diharapkan bahwa para pendamping yang lulusan perguruan tinggi ini mampu membantu masyarakat mengembangkan orientasi bisnis baru dengan memanfaatkan berbagai peluang usaha yang ada di lingkungan mereka. Di sejumlah propinsi ditempatkan pula tenaga-tenaga pendamping yang bukan sarjana karena tidak cukup tersedia tenaga sarjana. Yang diutamakan dari seorang pendamping adalah kemampuan menggerakkan masyarakat agar dapat memilih jenis usaha yang tepat,

mengelola usaha itu dengan baik, dan dapat memasarkan hasil-hasilnya, apabila ada, dengan lancar pula.

Jumlah kelompok masyarakat penerima dana IDT yang sudah terbentuk adalah 106.960 pokmas, dengan anggota 2.873.812 keluarga, kira-kira 12,6 juta orang. Nilai strategis program IDT terletak pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui penyaluran modal usaha yang mereka kelola sendiri sesuai kemampuan mereka. Sejumlah pengusaha telah membantu pelaksanaan program ini, bahkan ada asosiasi pengusaha yang membantu membiayai penyelenggaraan studi-studi (*action research*) tentang berbagai aspek yang mempengaruhi upaya-upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin di desa-desa tertinggal.

Propinsi Jawa Tengah penduduk yang jumlah keluarga miskin 4.732.721 KK, khusus kota Semarang 1228 KK. Hal ini merupakan perkara yang sangat besar sehingga diupayakan pemecahannya. Dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh karena akan berdampak kepada penurunan kualitas sumberdaya manusia kita pada umumnya. Di samping itu akan berpengaruh pada proses kehidupan berbangsa yang kita jalani. Sudah seharusnya penuntasan dan penanggulangan kemiskinan mendapat porsi yang memadai dan menjadi prioritas pembangunan saat ini dan masa mendatang. Sedangkan data kemiskinan dapat dilihat pada tabel 1.1. (lihat lampiran). Sedangkan untuk mengetahui jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Jawa Tengah tahun 2000, dapat dilihat pada Tabel 1.2 (lihat lampiran).

### **Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung lebih lanjut Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Desa Tertinggal. Program ini dimunculkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Secara khusus program PPK ini dirancang untuk

meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif dan pembangunan prasarana serta sarana pedesaan, dengan cakupan jenis kegiatan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. PPK ini juga diarahkan untuk menangani daerah yang mengalami masalah krisis ekonomi yang menyebabkan pengangguran dan bencana kekeringan yang menyebabkan rawan pangan.

Pengelolaan PPK ini diberikan secara langsung kepada masyarakat kecamatan melalui Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat penerima bantuan diberikan kebebasan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan melalui musyawarah desa.

Tujuan umum PPK adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan usaha di pedesaan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu *pertama*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. *Kedua*, meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan. *Ketiga*, menyediakan prasarana dan sarana bagi pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. *Keempat*, meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat desa dan di kecamatan untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sasaran utama penerima dana PPK adalah penduduk miskin, yang berada di kecamatan miskin dengan prioritas, yaitu pertama, kecamatan yang mempunyai jumlah desa tertinggal relatif lebih banyak. Kedua, kecamatan yang mempunyai

jumlah penduduk miskin relatif lebih banyak. Ketiga, Musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) telah terbentuk dan berjalan. Keempat, kecamatan-kecamatan yang mengalami krisis moneter yang menyebabkan pengangguran dan kecamatan-kecamatan yang mengalami kekeringan

Sumber dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berasal dari pemerintah dan masyarakat. Alokasi dana PPK yang bersumber dari pemerintah ditetapkan antara Rp 350 juta sampai dengan Rp 1 milyar per kecamatan berdasarkan jumlah penduduk. Setiap kecamatan mendapat bantuan maksimal 3 (tiga) kali. Di bawah ini adalah kriteria kecamatan dalam memperoleh dana PPK.

Tabel 1.3

**Perolehan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

<b>Lokasi</b>	<b>Penduduk/kecamatan</b>	<b>jumlah dana</b>
<b>Jawa</b>	>50.000 jiwa	Rp 1 milyar
	25.000 - 50.000	Rp 750 juta
	< 25.000	Tidak dipilih
<b>Luar Jawa</b>	> 25.000 jiwa	Rp 1 milyar
	15.000 - 25.000	Rp 750 juta
	< 15.000	Tidak dipilih
<b>NTT</b>	< 15.000	Rp 350 juta

Sumber : Konsultan PPK Propinsi Jateng, 1999

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penerima bantuan dana PPK. Pada tahun pertama (Tahun Anggaran 1998/1999) sebesar Rp 42.500.000.000,- (empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk 14 Kabupaten. Pada tahun kedua (Tahun Anggaran 1999/2000) memperoleh Rp 84.500.000.000,- (delapan puluh

empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk 16 Kabupaten yang meliputi 56 kecamatan.

### **Program Operasi Pasar Khusus Beras (OPKB)**

Pemerintah mengalami berbagai kendala dalam penyediaan dana APBN untuk meneruskan berbagai subsidi, termasuk di dalamnya subsidi BBM. Subsidi yang diberikan selama ini tidak terkecuali BBM, disamping kurang adil tetapi juga mahal (*costly*). Kurang adil, karena subsidi tersebut lebih banyak untuk berbagai keperluan dibandingkan dengan kelompok miskin. Mahal, karena bentuknya subsidi umum (*general subsidy*) sehingga biayanya lebih besar dibandingkan dengan subsidi *targeting*. Disamping itu, disparitas harga BBM dalam negeri dengan luar negeri akan menjadi besar bilamana pemerintah tetap menekan harga BBM menjadi murah dan akan memberikan peluang insentif buat penyelundupan dan telah menimbulkan moral hazard yang sulit diberantas.

Untuk itu, pemerintah secara bertahap mengurangi subsidi BBM. Pemerintah melakukan kenaikan BBM, sehingga dampak kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan harga barang lain atau *cost push inflation* yang sulit diindari. Salah satu akibatnya adalah pendapatan riil masyarakat akan menurun. Penurunan pendapatan riil masyarakat miskin jauh lebih parah dibandingkan dengan kelompok lainnya, karena sebagian besar (70%-80%) pendapatannya digunakan untuk pangan dan sebagian besar (60%) pengeluaran mereka untuk beras. Sehingga proporsi pengeluaran kelompok miskin untuk pangan khususnya beras akan meningkat lebih tinggi dan akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap tingkat konsumsi khususnya konsumsi energi dan protein.

Pemerintah ingin mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan transfer pendapatan (*income transfer*) melalui komoditas beras. Komoditas ini umum dikonsumsi oleh masyarakat tidak terkecuali masyarakat miskin. Sehingga dengan ditransfer pendapatan via beras, dampak buruk dari kenaikan harga BBM diharapkan dapat diperkecil.

**a. Apa (*what*) OPK Beras itu**

OPK Beras yaitu Bentuk program ketahanan pangan yang dilaksanakan Pemerintah agar masyarakat miskin mendapatkan kebutuhan pangan dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau, sehingga bahaya rawan pangan dapat dihindari.

**2. Siapa (*who*) yang mendapatkan OPK Beras itu**

Penerima bantuan OPKB adalah keluarga miskin menurut BKKBN yaitu keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera I karena alasan ekonomi (AL-EK). Daerah juga diberikan keleluasaan menambah rumah tangga miskin berdasarkan musyawara desa.

Sampai sekarang, OPKB telah menjangkau tidak kurang dari 7,5 juta rumah tangga miskin dipelosok tanah air.

**3. Bagaimana (*how*) mekanisme pelaksanaan OPK Beras Pusat**

- a. Menetapkan pagu dan menyampaikan ke Propinsi
- b. Melakukan sosialisasi program
- c. Memonitor dan menyusun laporan perkembangan
- d. Menyusun pedoman umum
- e. Menyusun panduan monitoring

**Propinsi**

- a. Menetapkan pagu per Kabupaten/Kota
- b. Memonitor perkembangan program
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan

**Kabupaten**

- a. Menyusun rencana distribusi sampai ke titik distribusi/desa/kelurahan
- b. Menetapkan pagu alokasi per titik distribusi
- c. Memonitor perkembangan program
- d. Memanfaatkan UPM
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan program.
- f. Mengajukan permintaan PPD-PSE bidang pangan ke Dolog yang mencantumkan jumlah RT, kuantum beras, lokasi (titik distribusi), gudang penyaluran dan jadual penyaluran.
- g. Dolog/Sub Dolog menerbitkan DO beras murah untuk PPD-PSE bidang pangan dan mengantarkan ke titik distribusi.
- h. Memberitahukan jadwal distribusi paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan distribusi
- i. Diperkenankan menyusun buku panduan bagi pelaksana.

**3. Titik Distribusi**

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan menetapkan penerima manfaat bersama tim independen, seperti organisasi kemasyarakatan, PKK, LSM, PT, dan Tokoh masyarakat melalui musyawarah desa.
- b. Setiap penerima manfaat memperoleh maksimal 20kg/bulan dengan harga Rp.1000,-/kg



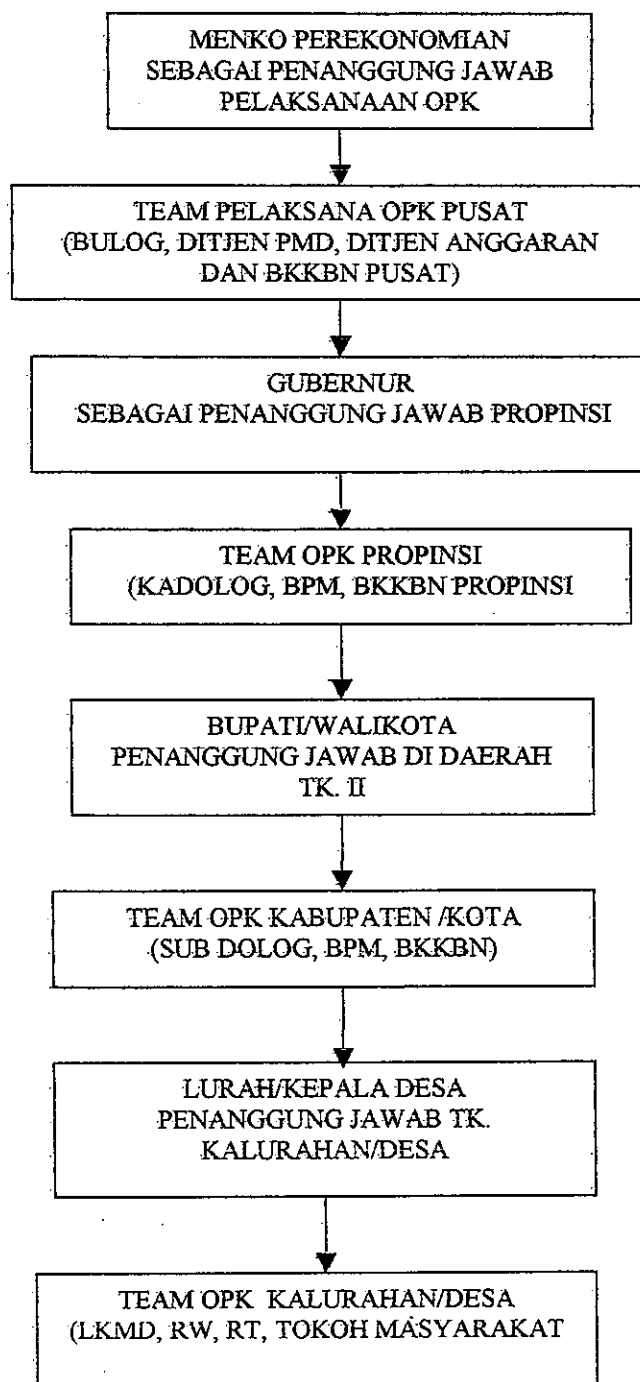
- c. Penetapan penerima manfaat disusun dan disebarluaskan melalui papan pengumuman desa.
- d. Menyampaikan rekapitulasi penerima manfaat, kuantum beras dan lokasi distribusi kepada Pemda Kabupaten/Kota
- e. Membuat buku registrasi sebagai bukti menerima beras
- f. Pemerintah Desa/kota dengan tim independen mendistribusikan beras ke penerima manfaat
- g. Mwnyusun dan menyampaikan laporan.

#### **4. Kapan (*when*) OPK Beras dilaksanakan**

OPK Beras merupakan bagian salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) untuk membantu keluarga miskin akibat krisis ekonomi (OPK Beras reguler). OPK Beras PPD-PSE dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2001

## **2. Struktur Organisasi UPM OPKB**

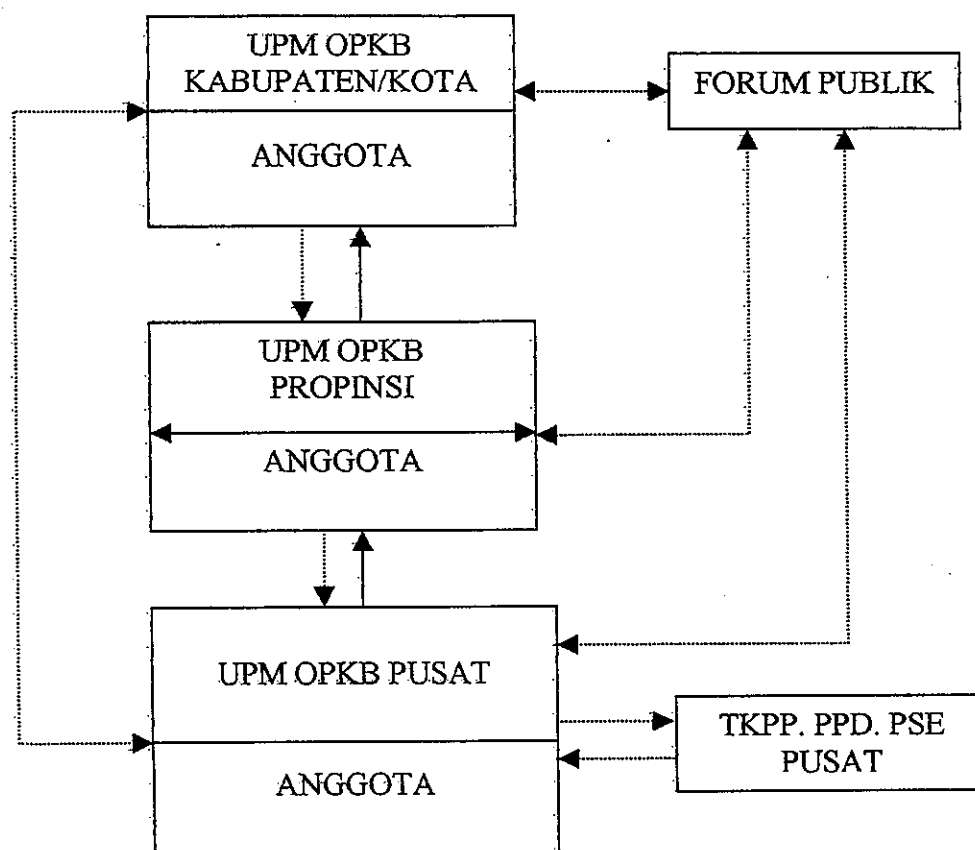
Program Operasi Pasar Khusus Beras merupakan salah satu cabang kebijakan pemerintah di bawah Operasi Pasar Khusus (OPK) dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu dengan penyediaan pangan (beras) dengan harga terjangkau oleh masyarakat miskin sebagai kelompok penerima manfaat. Selaku penanggung jawab dari pelaksanaan Operasi Pasar Khusus ini adalah Menko Perekonomian yang kemudian pelaksanaannya didelegasikan kepada Team pelaksana baik di tingkat pusat maupun daerah dengan penanggung jawab gubernur untuk tingkat propinsi, bupati untuk tingkat kabupaten dan kepala kelurahan untuk tingkat kelurahan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan berikut ini

**ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB OPK**

Keterangan :

- Bulog penanggung jawab pendistribusian
- Ditjen Anggaran Penanggung Jawab pembiayaan
- BPM. Penanggung Jawab keluhan masyarakat

### STRUKTUR ORGANISASI UPM OPKB



Keterangan :

- Garis Pembinaan
- - - - ->      Garis Pelaporan
- ← - - - -      Garis Koordinasi

TKPP PPD-PSE adalah Tim koordinasi pengelolaan dan pengendalian program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi (Keberadaan hanya di pusat)

Kota Semarang yang jumlah penduduknya sekitar 1.251.845 jiwa (1997). Jika dilihat dari aspek mata pencahariannya, yang terbanyak adalah dibidang jasa, kemudian oleh buruh industri, buruh bangunan, pegawai negeri serta ABRI, pedagang kemudian pertanian. Melihat kenyataan tersebut sebagian besar kehidupan masyarakat masih dibawah kemiskinan.

Pada tahun 1997 terjadi kemarau yang panjang, krisis ekonomi/moneter sehingga produksi pangan/beras turun tajam, nilai tukar rupiah turun/merosot yang dampaknya : harga-harga naik, daya beli masyarakat menurun, jumlah penduduk miskin dan rawan pangan meningkat. Hal ini terutama dirasakan masyarakat miskin di kota Semarang yang mengalami menurunnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan/beras. Salah satu Program Pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di Kota Semarang melalui Program OPK beras

## **B. Identifikasi masalah dan Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengemukakan pokok pikiran atau hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terurai pada masalah yang menjadi judul penelitian. Menurut Sumadi Suryabrata (1983:89), masalah atau permasalahan adalah kalau ada kesenjangan atau *gap* antara *das sollen* dan *das sein* ada perbedaan antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia antara harapan dan kenyataan.(Sumadi Suryabrata,1987:66)

Dengan demikian masalah adalah persoalan yang bisa terpecahkan, menurut Sumadi Suryabrata, merumuskan masalah didasarkan atas hal-hal tertentu meliputi:

1. Masalah dirumuskan dalam kalimat tanya;
2. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah;

3. Rumusan masalah hendaknya jelas dan padat;
4. Merupakan dasar dalam pembuatan hipotesis.

Melihat dari berbagai faktor yang melatarbelakangi upaya penanggulangan kemiskinan, peneliti beranggapan bahwa Pemerintah dan Pembinaan OPKB merupakan faktor yang sangat mempengaruhi motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang.

Dengan demikian perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh Perumusan Kebijakan terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang ?
2. Apakah ada pengaruh pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang ?
3. Apakah ada pengaruh Perumusan Kebijakan dan pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Di dalam penulisan ini peneliti mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan ?
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan ?
3. Untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Perumusan Kebijakan dan pembinaan program OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

## 1. Kegunaan Praktis

Dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak :

- a. Bagi peneliti sendiri untuk mempelajari lebih mendalam tentang keberhasilan program OPKB.
- b. Bagi pemerintah sebagai masukan bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut bagi keberhasilan program OPKB.
- c. Bagi masyarakat untuk ikut mensukseskan program OPKB.
- d. Sebagai masukan untuk menyempurnakan program OPKB juga sekaligus sebagai koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sehingga masing-masing pihak terkait dan bertanggung jawab terhadap program OPKB di Kota Semarang dapat diperbaiki kelemahan dan kekurangannya.

## 2. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah masukan bagi penelitian pada khususnya dan sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Publik pada umumnya serta demi pengembangan ilmu pengetahuan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Landasan teori atau kerangka teori sering pula disebut sebagai tinjauan pustaka. Hal ini merupakan pemikiran lebih lanjut dari masalah yang akan diteliti. Dengan kerangka teori kita dapat memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Selain itu landasan teori akan merupakan pembuktian dengan menghubungkan-hubungkan teori-teori yang sudah ada.

Menurut Koentjaraningrat (1983 :12) mendefinisikan teori sebagai berikut :  
“Teori pada hakekatnya merupakan akibat adanya hubungan positif antara gejala-gejala yang sedang diteliti dengan satu atau beberapa gejala terutama dalam masyarakat (Koentjoroningrat,1983:19). Dengan demikian teori itu pada dasarnya serangkaian konsep yang dicoba disusun untuk menjelaskan sesuatu fenomena yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh fenomena-fenomena lain.

Sementara menurut Bintoro Tjokroamidjojo teori adalah :

Ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara berbagai gejala atau antara perubahan (*variabel*) dalam bidang tertentu sehingga dapat dipergunakan sebagai kerangka pikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menanggapi permasalahan tertentu yang timbul dalam masyarakat (Bintoro,1987:12)

Dari difinisinya Bintoro tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis di antara berbagai gejala dengan satu atau beberapa gejala atau variabel. Sedangkan pengertian variabel itu sendiri adalah suatu gejala yang mempunyai variasi nilai. Dalam penelitian ini teori digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menanggapi permasalahan yang dapat

dipakai untuk menjelaskan dan meramalkan gejala-gejala yang dihadapi sehingga landasan teori akan membantu dalam menetapkan tujuan dan arah penelitian dalam pembentukan hipotesis.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pusat penelitian adalah mengenai pengaruh pemerintah dan pembinaan OPKB yang masing-masing sebagai variable independent dan motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan sebagai variabel dependent. Keberhasilan Program OPKB sangat diperlukan. Untuk dapat lebih mendorong keberhasilan Program OPKB sangat diperlukan peran pemerintah dan pembinaan OPKB dengan dukungan pihak-pihak terkait.

Dalam penyusunan penelitian ini dibuat landasan teori mengenai faktor-faktor pendukung dengan melalui buku-buku kepustakaan, sehingga berdasarkan teori tersebut peneliti berusaha mengembangkan dan selanjutnya dipergunakan sebagai pemecahan.

Adapun dalam landasan teori ini akan dibahas masalah Perumusan Kebijakan (*Policy*), Motivasi, Pembinaan, Kemiskinan, dan OPKB.

### **1. Perumusan Kebijakan (*policy*)**

Sebagai tahap awal penyusunan landasan teori dalam penelitian ini, peneliti pertama-tama akan memaparkan secara umum konsep Perumusan Kebijakan (*policy*). "Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu" (Meriem, 1983:12)

Dalam hal ini Hoogerwerf (dalam Meriem, 1983:13) berasumsi bahwa kebijakan adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.



Selanjutnya menurut Edi Santosa (2001) mendefinisikan Kebijakan Pemerintah merupakan kemampuan pemerintah (kapabilitas) dalam hal pengaturan, alokasi dan distribusi, responbilitas/kepekaan terhadap aspirasi masyarakat dan azas legalitas.

Dalam proses pembentukan kebijaksanaan publik harus sesuai dengan UU No.22 tahun 1999 yang membahas tentang “Fungsi penyelenggaraan Pemerintah pada pertimbangan sbb: fungsi perumusan kebijakan, fungsi kepemimpinan, fungsi pengawasan, fungsi pelayanan”.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas Peneliti menyimpulkan bahwa perumusan kebijakan (*policy*) adalah menyangkut: “apa yang dilakukan dan hendak dilakukan oleh pemerintah serta apa yang tidak dilakukan atau tidak hendak dilakukan oleh pemerintah”. Hal itu dirumuskan melalui proses yang panjang, mulai dari pembentukan agenda masyarakat yang kemudian dijadikan agenda pemerintah, setelah itu diputuskan secara bersama-sama dengan lembaga perwakilan rakyat atau oleh pemerintah sendiri, dan pada akhirnya diimplementasikan oleh pemerintah sendiri.

## 2. Pemerintah

Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara / bagian-bagiannya” (Balai Pustaka:1990). Dari definisi ini terlihat begitu luas bidang cakupan pemerintah, serta masih ada dimungkinkan masalah yang demikian banyak ini ditambah lagi dengan persoalan dan bagian-bagian negara tersebut (luasnya daerah kekuasaan). Sedangkan pemerintahan, dalam kamus yang sama mengandung tiga arti yang dua

diantaranya adalah pertama, proses atau cara perbuatan memerintah, sedangkan yang kedua, adalah segala urusan yang diajukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan negara.

Dalam kondisi demikian, maka ada sebagian negara menyerahkan urusan pemerintahan ini kepada negara bagian yang lebih kecil atau daerah-daerah bawahannya demi terciptanya efisiensi, efektivitas serta keadilan. Pendelegasian urusan pemerintah ini dapat berbentuk desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan pada negara kesatuan, atau berupa bentuk hubungan uni bagi negara federal.

Dalam rangka menjalankan asas pemerintahan desentralisasi sesuai pasal 4 UU No. 22 Tahun 1999 sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (UU no 22 tahun 1999). Penerapan asas desentralisasi ini melahirkan bentuk daerah propinsi, daerah kabupaten serta daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Bentuk daerah propinsi, kabupaten dan kota dikenal sebagai pemerintah daerah yang menurut pasal 1 ayat 2 adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Dalam UU ini juga dijelaskan bahwa yang disebut pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri (pasal 1 butir a). Masing-masing daerah-daerah diatas berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkhi satu sama lain.

Istilah daerah kota merupakan istilah baru dalam pemerintahan Indonesia dan dikenal semenjak diberlakukan UU ini, daerah kota ini adalah bentuk penggantian nama dari Daerah Kotamadya Tingkat II, seperti disebut dalam

penjelasan UU no. 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya.

### 3. Motivasi

Pengertian motivasi menurut Buchari Zainun (1979:10) yaitu :

Motivasi dapat dilihat sebagai bagian yang fundamental dari kegiatan manajemen, sehingga sesuatu dapat ditujukan kepada pengarah potensi dan penumbuhan tingkat keinginan yang tinggi, kebersamaan dalam menjalankan tugas-tugas perseorangan maupun kelompok dalam organisasi.

Lebih lanjut Moekijat (1984:8) mengemukakan bahwa :

Motivasi merupakan proses atau faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Adapaun proses motivasi mencakup:

- a. Pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan
- b. Penentuan tujuan yang akan memuaskan kebutuhan
- c. Penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan.

Sedangkan motivasi menurut Wahjo Sumijo seperti yang dikutip Moekijat (1984:12) yaitu :

Motivasi sebagai proses psykologis timbul diakibatkan oleh faktor dalam diri seseorang itu sendiri, yang disebut dengan intrinsik dan faktor diluar dari seseorang yang disebut faktor ekstrisik. Faktor dalam diri seseorang dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, dan pendidikan atau berbagai harapan dan cita-cita yang menjangkau ke masa depan. Sedangkan faktor di luar dapat timbul oleh beberapa sumber, bisa karena pengaruh pimpinan, kolega atau faktor-faktor yang sangat komplek.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan seseorang untuk berbuat sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Dan yang dimaksud

motivasi internal yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang, dalam hal ini keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat non material. Tumbuhnya faktor intrinsik ini bisa dikarenakan adanya pendidikan, penyuluhan/pembinaan dan pengalaman. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul akibat adanya rangsangan dari luar diri seseorang. Rangsangan yang dimaksud yaitu dapat berasal dari adanya pengaruh dari pimpinan.

Demikian terlihat bahwa para ahli itu memberikan pengertian tentang motivasi dengan gaya dan penelaahan sendiri. Disini peneliti akan menggunakan pendapat dari Atkinson, yaitu :

- Bahwa kekuatan motivasi dalam bentuk persamaan, motivasi = fungsi (motif, expectancy dan intensif) atau  $M = F (M+E+I)$ . Adapun kekuatan dari motivasi untuk melakukan beberapa kegiatan adalah suatu fungsi dari
- a. Kekuatan yang menjadi alasan bergerak atau suatu keadaan dimana ada pada setiap orang, tingkatan alasan atau motive-motive yang menggerakkan tersebut. Menggambarkan tingkah laku untuk memenuhi suatu kepetingan.
  - b. Harapan, atau expectancy adalah dimana kemungkinan atau keyakinan perbuatan akan mencapai tujuan.
  - c. Nilai dari insentif dimana ganjaran-ganjarannya demi tercapainya tujuan (J. Ravianto, 1985:95)

Jadi dari pendapat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa 3 faktor di dalam motivasi, yaitu :

3. Motif (pendorong)
4. Expectancy (harapan)
5. Insentif (rangsangan)

Dalam penelitian ini, seperti telah disebutkan dalam ruang lingkup permasalahan, bahwa pembatasan motivasi dibatasi pada motif dan harapan.

#### Ad. 1. Motif (Pendorong)

Edgar Schein memberikan pendapat bahwa “ suatu motif adalah sesuatu yang dapat menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu (1985:112)

Dari pendapat tersebut di atas, motif adalah suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan atau tungkah laku untuk mencapai tujuan tertentu.

#### Ad.2. Expectancy (Pengharapan)

Pengharapan menurut Kuncorohadi (1985:88), bahwa harapan adalah kekuatan dari kepercayaan bahwa sesuatu tindakan tertentu akan diikuti oleh hal-hal tertentu.

Dari pendapat tersebut, harapan merupakan suatu kekuatan yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan dengan didasari kepercayaan bahwa suatu tindakan tertentu akan diikuti oleh hasil tertentu pula atau kata lain tercapai tujuan.

Dari uraian yang telah peneliti paparkan di atas dapat diketahui bahwa motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang maupun dari orang lain yang mampu mendorong perilaku mereka dalam rangka berpartisipasi program OPKB.

#### 4. Pembinaan

Pengertian pembinaan menurut George Terry (dalam Ibu Syamsi, 1987:75) adalah:

Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apa yang akan sedang dilakukan yaitu mengevaluasi pelaksanaan dan apabila perlu mengadakan pembetulan agar pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ada.

Sedangkan menurut Miftahtoha (1986:80), pembinaan yaitu:

Sebagai pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dengan pembinaan juga pengembangan makna sebagai pembaharuan yang melakukan suatu usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan untuk mengarahkan dan menentukan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana.

## 5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah publik yang sering menjadi ajang perdebatan atau pembicaraan oleh kaum intelektual maupun masyarakat biasa. Masalah kemiskinan hampir ada di setiap negara di dunia, baik dinegara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis maupun negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Oleh Mubyarto (1998:12) dikatakan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan akan pangan, sandang, papan, hidup sehat, pendidikan, komunikasi sosial dan sebagainya. Penduduk miskin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya, tidak saja karena tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, melainkan juga karena struktur sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik tidak membuka peluang bagi orang miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Seseorang menjadi miskin bukan karena kehendaknya sendiri. Kemiskinan itu tidak dapat dihindarkannya karena ia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar dari atau melenyapkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinannya. Karena kemiskinan sering ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin dalam

lemahnya kemauan untuk maju, dan rendahnya produktifitas, maka orang miskin sering memberi kesan miskin karena kesalahannya sendiri.

Dalam salah satu tulisan mengenai budaya kemiskinan oleh Carl Lewis, seperti yang dikutip Mubyarto (1998:15), dikatakan bahwa kaum miskin akan selalu beradaptasi dengan kondisi yang serba sempit, kemudian melahirkan budaya dari kristalisasi cara-cara hidup yang serba terbatas itu. Kemiskinan merupakan keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah negara yang menyebabkan ketidak nyamanan hidup, terancamnya penegakan hukum dan keadilan, terancamnya *bargaining* (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya génerasi serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Berbagai cara pandang terhadap kemiskinan ini telah digunakan untuk menganalisis kondisi kemiskinan di Indonesia, misalnya miskin ekonomi, pendidikan, akses, moral, penegakan hukum dan keadilan serta harga diri.

Untuk mengentaskan penduduk miskin dari lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan, diperlukan suatu kebijakan, komitmen, organisasi, dan program, serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu, diperlukan juga suatu sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai obyek. Orang miskin harus dianggap sebagai manusia yang utuh dan merupakan subyek pembangunan. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang hanya mempunyai sedikit.

Dalam kasus di Indonesia, kemiskinan sudah banyak berkurang sejak pembangunan nasional berhasil menumbuhkan ekonomi nasional dengan rata-rata 7% per tahun selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I). Pengurangan penduduk miskin cenderung melambat ketika yang dihadapi adalah

kelompok penduduk yang benar-benar berada pada pusaran utama kemiskinan (*core poverty*). Mereka itu adalah keluarga-keluarga paling miskin dari kelompok petani gurem dan buruh tani, nelayan kecil, peternak, dan warga desa yang bermukim tersebar di wilayah-wilayah pedalaman yang terisolasi.

Badan Statistik (2000) kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Menurut hasil survey Susenas (1999), kemiskinan disetarakan dengan pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan sebesar Rp.89.845,-/kapita/bulan dan Rp. 69.420,-/kapita/bulan. Dan apabila ditinjau dari kajian kausalitas atau sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Dari data empiris dapat diambil kesimpulan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan tidak memadai, adanya bencana alam dan lain lain. Yang kedua, kemiskinan yang disebabkan karena faktor non alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lain lain. Kausalitas kemiskinan dalam kajian ini adalah, bahwa penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah faktor non alamiah, terutama karena adanya kesalahan dalam kebijakan ekonomi.

Salah satu prasyarat keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasikan *target group* dan *target area*. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya "*Si Miskin*" tersebut dan dimana si miskin itu berada. Profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik karakteristik ekonominya seperti sumber pendapatan,



pola konsumsi/pengeluaran, tingkat beban tanggungan dan lain lain. Juga perlu diperhatikan dari sosial-budaya dan tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan sebagainya.

Penyebaran kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik geografisnya, yaitu dengan menentukan di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Untuk kasus Indonesia, aspek geografis ini bisa terbagai dalam penyebaran kota dan desa, di Jawa dan di luar Jawa.

Di Indonesia, secara umum memakai standar pengukuran kemiskinan dari standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau penyesuaian dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin. Kajian utama didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minuman makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minuman bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten oleh BPS sejak tahun 1976. Sayogyo dan Sam F. Poli dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita. Konsumsi beras untuk perkotaan dan pedesaan masing-masing ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita per tahun (BPS, 1994). Sebaliknya Bank Dunia menggunakan standard mata uang dollar Amerika Serikat, yaitu untuk dekade 1980, standart pengeluaran untuk makanan adalah 50 dolar AS untuk pedesaan dan 75 dolar AS untuk per kapita per tahun (berdasarkan kurs dasar dollar 126 terhadap rupiah pada tahun 1971}. BPS dalam mengadopsi ukuran dari Bank Dunia melakukan penyesuaian

dengan pola dasar konsumsi pada tahun 1971, dan kemudian disesuaikan dengan kenaikan harga (*inflasi*) dari bahan makanan pokok. Penyebaran kemiskinan, demografis, pekerjaan, sumber penghasilan, dan pola konsumsi penduduk miskin dan kaya.

Ukuran kemiskinan yang dianut oleh negara-negara dari standar Bank Dunia, ternyata secara empiris kadang-kadang kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan. Terutama membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan. Tidak semua kemiskinan identik dengan ketidak sejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. *Sen poverty index (SPI)* yang merupakan formula yang digunakan untuk mengukur indeks kemiskinan, ternyata tidak mampu mengukur kesejahteraan. SPI yang lebih mendasarkan pada *poverty head account ratio* dan ini yang diambil dari penyebaran pendapatan per kapita (koefisien Gini) ternyata hanya mengukur kemiskinan dari tingkat pendapatan. Apakah tingkat pendapatan tersebut mencerminkan kemiskinan? Jawaban pertanyaan ini bisa betul dan bisa tidak, tergantung bagaimana pola konsumsi, pola kehidupan serta faktor jaminan keamanan akan kehidupan dari setiap negara kepada penduduknya. Studi Birdsall (1995) di negara-negara Asia Timur yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi ( $>7\%$ ), sedang ( $5\%-6\%$ ) dan rendah ( $<5\%$ ) selama 30 tahun, menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang berbeda. Studi Birdsall menunjukkan bahwa Srilangka yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang relatif rendah ( $<5\%$ ) dan mempunyai indeks SPI yang rendah (yang menunjukkan tingkat pendapatan per kapita dalam US dollar rendah atau kurang dari 500 dolar AS per tahun) ternyata mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia, atau misalnya Brazil (yang mempunyai

pendapatan per kapita diatas 5000 dolar AS pertahun). Anand dan Kanbur (1993) mengusulkan pola pengukuran kemiskinan dengan memasukan variabel variabel non keuangan (*non financial variables*), seperti kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, fasilitas kesehatan yang luas dan murah, kesempatan kerja yang tinggi, angka kematian balita dan ibu yang melahirkan, tingkat kemungkinan hidup, sistem perumahan dan sarana kesehatan umum, listrik dan lain lain.

Sedangkan menurut BKKBN keluarga miskin adalah Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 karena alasan ekonomi (AL-EK).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga miskin (rawan pangan) adalah :

2. Keluarga tidak mampu makan dua kali
3. Keluarga tidak mampu mengkonsumsi pangan sumber protein minimal seminggu sekali.
4. Sudah ada anaknya yang putus sekolah
5. Pekerja/buruh kasar terkena PHK massal
6. Bila anggota keluarga sakit tidak mampu ke fasilitas kesehatan
7. Kriteria lain sesuai kondisi obyektif dan pertimbangan daerah.

## **6. Operasi Pasar Khusus Besar (OPKB)**

OPK Beras adalah merupakan program ketahanan pangan yang dilaksanakan agar masyarakat miskin mendapatkan kebutuhan pangan dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau, sehingga bahaya rawan pangan dapat dihindari.

OPK Beras terdapat dua macam :

- a. OPK Beras Rutin/Reguler : salah satu Program Jaring Pangan Sosial (JPS) untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 yang memberatkan beban hidup dan menurunnya daya beli masyarakat miskin.
- b. OPK Beras PPD-PSE : Salah satu program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) Bidang Pangan bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan konsumsi energi dan protein melalui komoditas beras sebagai dampak kenaikan harga BBM.

## **B. Hipotesis**

Di dalam penelitian yang dilakukan, hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah-masalah yang sedang diteliti kebenarannya dan harus diuji secara empiris.

Menurut Masri Singarimbun, hipotesis adalah kesimpulan sementara atau populasi tentatif tentang hubungan dua variabel atau lebih (1972:34)

Ciri utama dari hipotesa yang baik adalah :

1. Kesadaran dalam perumusan
2. Penggunaan variabel-variabel yang tegas
3. Berbentuk sedemikian rupa sehingga kebenarannya dapat diuji oleh peneliti (Koentjoroningrat, 1988:23)

Untuk merumuskan hipotesis menurut Sumadi Surya Brata ada beberapa cara yaitu :

1. Hipotesa hendaknya menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih.
2. Hipotesa hendaknya dinyatakan dalam kalimat pernyataan.
3. Hipotesa hendaknya dirumuskan secara jelas dan padat.
4. Hipotesa hendaknya dapat diuji, artinya orang mungkin akan mengumpulkan data guna menguji kebenaran hipotesa tersebut (1983:78)

Sedangkan menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Hipotesis kerja atau hipotesis alternatif ( $H_a$ )

Yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain.

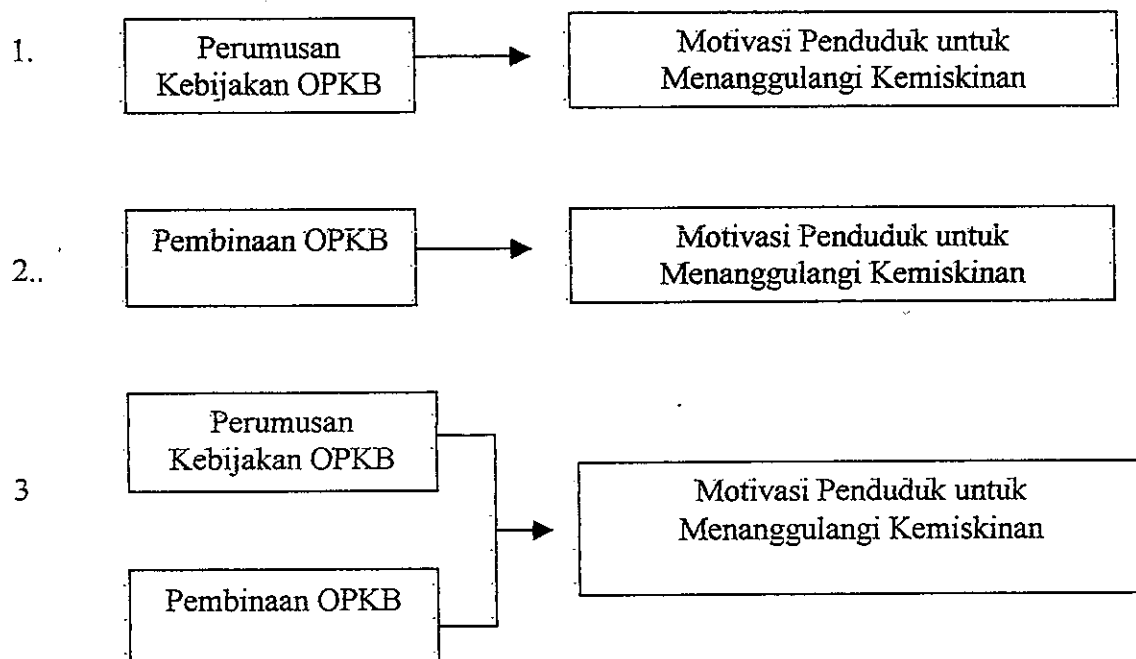
## 2. Hipotesis nol ( $H_0$ )

Yaitu hal menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan hipotesis kerja ( $H_a$ ) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh perumusan kebijakan terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan .
2. Ada pengaruh pembinaan program OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan.
3. Ada pengaruh perumusan kebijakan dan pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan.

Untuk memperjelas hipotesis kerja ( $H_a$ ) peneliti gambarkan sebagai berikut :



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Rancangan Penelitian / Pendekatan Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses yaitu mata rantai langkah-langkah yang dilakukan secara terencana, sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah yang dilakukan itu mempunyai bobot yang memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak diragukan. Oleh karena itu dalam suatu penelitian ditentukan suatu penelitian yang menggunakan metodologi.

Sehubungan dengan rencana penelitian maka diperlukan suatu tipe penelitian yang dianggap cocok. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian eksplanatori, dimana menurut Masri Singarimbun penelitian eksplanatori yaitu:

Eksplanatori yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian-penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

##### **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Suatu penelitian agar tidak meluas pembahasan terhadap topik penelitiannya, maka diperlukan suatu batasan-batasan penelitian. Batasan-batasan ini harus jelas dinyatakan dan harusnya dibuat terlebih dahulu pada fase-fase awal dari proses penelitian.

Dalam hal ruang lingkup penelitian Koentjaraningrat (1983:18) menuliskan, bahwa ruang lingkup permasalahan dapat ditentukan atas pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Maksud dan perhatian penelitian
- 2 Bahan yang ada mengenai masalah yang bersangkutan
- 3 Rumitnya anggapan dasar atau asumsi yang sudah dirumuskan
- 4 Penelitian lapangan yang sudah dilakukan

Dalam hal ini sesuai dengan bidang kajian ilmu peneliti, maka penelitian adalah dalam hal apa saja pengaruh peran pemerintah dan pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan yang sedang dialami masyarakat.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam studi ini dilaksanakan dengan unit analisis yang meliputi beberapa wilayah Kepala Keluarga miskin yang memperoleh kebijakan program OPKB. Sedangkan yang dipakai fokus kajian empat Kelurahan yaitu Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Bangetayu, Kelurahan Sukerejo, dan Kelurahan Kalipancur Kodia Semarang.

#### **D. Variabel Penelitian**

Agar penelitian ini mengarah ditetapkan konsep pokok yang perlu diamati, yaitu :

1. Variabel Independen
  - a. Perumusan Kebijakan, dengan indikator-indikatornya :
    - Identifikasi kebijakan
    - Perencanaan Kebijakan
    - Implementasi Kebijakan
    - Penyelenggaraan operasional kebijakan
    - Kapasitas / kapabilitas pengambilan kebijakan

- Orang atau unit pelaksana kebijakan
- Esensi / substansi kebijakan
- Proses dan isi kebijakan

b. Pembinaan OPKB , dengan indikator- indikatornya sebagai berikut:

- Intensitas pembinaan
- Skala prioritas program
- Pendekatan pembinaan langsung / tidak langsung
- Muatan pembinaan (bina usaha dan bina manusia)
- Implementasi pembinaan

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan, sedangkan indikator-indikatornya sebagai berikut :

- Kompetisi<sup>ensi</sup>
- Eksistensi
- Apresiasi
- Orientasi
- Tujuan
- Pengharapan

## E. Definisi Konsepsional

Didalam menjelaskan definisi konsepsional terlebih dahulu akan dikemukakan pendapat mengenai konsep menurut Koentjaraningrat yaitu : “ Konsep adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala itu” (1983:70). Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sopian Efendi (1981:58) “Unsur penelitian yang terpenting



dan merupakan definisi yang dipakai peneliti untuk menggambarkan secara abstrak fenomena atau gejala social atau gejala alam”

Dengan demikian definisi konsep merupakan definisi dari fakta atau gejala yang diamati sehubungan dari permasalahan yang diajukan agar dapat memberikan pemahaman yang sama tentang konsep antara penelitian dengan pembaca sehingga semua dapat memahami arti konsep yang dimaksud dalam penelitian ini.

Atas dasar pengertian tersebut maka peneliti sajikan konsep dasar yang merupakan tinjauan atau sudut pandang peneliti terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dalam tahapan ini dijelaskan mengenai perbatasan pengertian suatu dari hal-hal yang diamati.

#### 1. Perumusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan adalah apa yang dilakukan dan hendak dilakukan oleh pemerintah serta apa yang tidak dilakukan dan tidak hendak dilakukan oleh pemerintah.

#### 2. Pembinaan OPKB

Adalah suatu tindakan yang dilakukan OPKB untuk mengarahkan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang ada.

#### 3. Motivasi penduduk

Adalah keseluruhan dorongan penggerak baik dari dalam diri seseorang maupun pihak lain yang mampu menimbulkan semangat untuk mengikuti penanggulangan kemiskinan tanpa ada paksaan dan rasa takut.

## **F. Definisi Operasional**

Salah satu unsur yang membantu penelitian adalah definisi operasional menunjukkan agar konsep yang telah dikemukakan dapat ditunjukkan operasionalnya. Sehingga definisi operasional adalah merupakan penjabaran suatu variabel tersebut dapat diketahui ukurannya.

Menurut Masri Singarimbun (1982:26), definisi operasional adalah :  
 “Mengubah konsep-konsep yang berupa konstrukstur dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain“

Sesuai dengan konsep diatas maka definisi operasional merupakan operasionalisasi dari definisi konsepsional, dimana dalam hal ini ditentukan indikator-indikator dan pengukurannya. Jadi definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana variabel tersebut diukur.

### **1. Variabel Independen**

#### **a. Perumusan Kebijakan**

Yaitu sekumpulan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Variabel ini dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

##### **1) Identifikasi kebijakan, dapat diukur dengan:**

Tingkat perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

##### **2) Perencanaan Kebijakan, diukur dengan :**

Tingkat perhatian pemerintah terhadap hubungan dengan masyarakat

##### **3) Penyelenggaraan operasional kebijakan, diukur dengan :**

Penggunaan faktor-faktor pendorong dalam mempengaruhi penduduk.

##### **4) Kapasitas / kapabilitas pengambilan kebijakan, dapat diukur dengan :**

Tingkat kemampuan pemerintah dalam pemecahan masalah.

5) Unit pelaksanaan kebijakan, dapat diukur dengan :

Tingkat keluasaan pandang sosial terhadap pemerintah

Orang atau unit pelaksana kebijakan

6) Proses dan isi kebijakan, dapat diukur dengan :

Tingkat pemberian informasi pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan

b. Pembinaan OPKB, dengan indikator- indikatornya sebagai berikut:

1) Intensitas pembinaan, dapat diukur dengan :

- Bentuk-bentuk pembinaan
- Frekuensi pembinaan
- Teknik-teknik pembinaan

2) Skala prioritas program, dapat diukur dengan :

Tingkat ketepatan/keteraturan waktu pembinaan

3) Pendekatan pembinaan langsung / tidak langsung, dapat diukur dengan :

- Tingkat pemantauan terhadap pelaksanaan program
- Tingkat kemauan petugas dalam melakukan pembinaan

4) Muatan pembinaan (bina usaha dan bina manusia), dapat diukur dengan :

- Ketepatan dalam pengambilan pinjaman
- Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan bina usaha

### 3. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan, sedangkan indikator-indikatornya sebagai berikut :

1) Kompetisi, dapat diukur dengan :

Tingkat keinginan penduduk untuk meningkatkan pendapatan keluarga

2) Eksistensi, dapat diukur dengan :

Tanggapan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberi binaan

3) Apresiasi, dapat diukur dengan :

Tingkat keyakinan responden dengan mengikuti program penanggulangan kemiskinan akan meningkatkan pendapatan keluarga.

4) Orientasi, dapat diukur dengan :

Tingkat pendapatan keluarga

5) Tujuan, dapat diukur dengan :

- Tingkat keyakinan penduduk akan keberhasilan dalam suatu usaha
- Tingkat kepuasan penduduk terhadap bina usaha

6) Pengharapan, dapat diukur dengan :

Manfaat yang dirasakan penduduk dalam mengikuti program penanggulangan kemiskinan.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan dan melakukan pencatatan terhadap data yang ada hubungannya atau keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku, gambar dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Questioner (daftar pertanyaan)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tersusun secara sistematis, dimana daftar pertanyaan tersebut harus dijawab oleh responden.

- d. Interview (wawancara)
- e. Yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang telah disusun secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Dimana wawancara tersebut dilakukan secara lesan yaitu dengan Menko Perekonomian, Kepala Bulog, Kepala BKKBN, Walikota, Camat, Kepala Kelurahan, Masyarakat.

## **H. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ada dua macam, yaitu :

- b. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban pertanyaan atau quesiner yang telah diisi oleh responden.

- c. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Hal ini dilakukan dengan membaca buku-buku, dokumen-dokumen, daftar monografi yang berhubungan dengan penelitian.

## **I. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan kepala keluarga yang menerima manfaat (bantuan beras) atau keluarga miskin di Kota Semarang, terutama empat Kelurahan yang terkena program tersebut, yaitu :

- a. Kelurahan Bangtayu Wetan;
- b. Kelurahan Bandarharjo;
- c. Kelurahan Kalipancur; dan
- d. Kelurahan Sukorejo.

## 2. Elemen

Elemen populasi merupakan unit yang akan diteliti atau unit elementer, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang telah menerima bantuan beras dari Program OPKB.

## 3. Sampling Frame

Sampling frame adalah daftar semua unsur sampling frame yaitu daftar semua unsur sampling dalam populasi, sedangkan dalam penelitian ini sampling frame yaitu daftar kepala keluarga yang mendapat bantuan beras dari Pemerintah (OPKB) di Kota Semarang yang meliputi : Kelurahan Bangtayu Wetan, Bandarharjo, Kalipancur, dan Sukorejo. Untuk model sampling frame bisa dilihat seperti berikut :

No	Nama	Pekerjaan	Alamat / Kelurahan
1	Marimin	Swasta	Sukorejo
2	Rahman	Dagang	Bandarharjo
3	Tasman	Dagang	Kalipancur
4	Sukar	Swasta	Bangtayu Wetan
5	dst		

## 4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian, peneliti tidak perlu meneliti semua individu dalam populasi, karena akan membutuhkan waktu lama dan juga membutuhkan biaya

yang cukup besar. Oleh karena itu peneliti mengambil sebagian dari populasi yang diharapkan hasil yang diperoleh akan menggambarkan sifat dan ciri populasi yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan populasi adalah jumlah seluruh dari unit-unit yang dianalisa yang ciri-cirinya akan diduga. Maka yang menjadi populasi adalah keseluruhan keluarga miskin yang berada di Kota Semarang, yang berjumlah 42.297 kepala keluarga.

Sutrisno Hadi mengemukakan pendapat tentang pengambilan sampel, yaitu : “Sebenarnya tidak ada suatu ketetapan yang mutlak berupa proses suatu sampel diambil dari suatu populasi. Ketidaktepatan yang mutlak itu tidak perlu menimbulkan keraguan pada peneliti “

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga miskin dari empat Kelurahan yang jumlahnya 1228 KK, dan yang dipakai sampel sebanyak 96 responden dengan dasar ketentuan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

n : sampel  
N : populasi  
d : derajat signifikan

$$\begin{aligned} n &= \frac{1228}{1228 (10\%)^2 + 1} \\ &= \frac{1228}{1228 (0,01) + 1} \\ &= \frac{1228}{13,28} \\ &= 92,47 \\ &= 93 \end{aligned}$$

Untuk memenuhi proporsi distribusi ke 4 lokasi penelitian, maka diambil responden sejumlah 96 (dengan dasar ketentuan dari wilayah yang berbeda, sasaran OPKB yang berbeda, kelompok penerima yang berbeda, waktu penerimaan yang berbeda dan jumlah KK yang berbeda). Dengan demikian tiap kelurahan dari 4 wilayah kelurahan (Kel. Bangtayu, Sampangan, Sukorejo dan Kalipancur) diambil sebagai sampel sebanyak 24 responden.

No	Nama Kelurahan	Sampel
1	Sukorejo	24
2	Bandarharjo	24
3	Kalipancur	24
4	Bangtayu Wetan	24
	Jumlah	96

## 5. Skala Pengukuran

Data yang dianalisis berasal dari jawaban responden terhadap pertanyaan, baik berupa pendapat, persepsi, pengetahuan untuk mendapatkan fakta dari suatu keadaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Yaitu dengan cara mengurutkan jawaban responden dari tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi menurut suatu atribut tertentu tanpa ada petunjuk yang jelas berapa jumlah absolut atribut-atribut yang dimiliki responden. Sedangkan pemberian score dalam pertanyaan penelitian ini berdasarkan jumlah alternatif jawaban yang ada, dengan nilai terkecil 1 dan nilai terbesar berada pada alternatif jawaban A.

## J. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

### 1 Teknik pengolahan data



a. Editing

Yaitu kegiatan meneliti atau memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran dalam suatu pengisian questioner, sehingga dapat diperoleh data yang valid.

b. Koding

Yaitu pemberian tanda atau simbol bagi tiap data yang masuk dalam kategori yang sama dengan huruf atau angka.

c. Tabulating

Yaitu kegiatan untuk menyusun data ke dalam Tabel kegiatan untuk menyusun data ke dalam Tabel yang telah disediakan, sehingga akan memudahkan peneliti untuk melaksanakan tabulasi, yaitu data yang telah disusun menurut jenisnya diklasifikasi sehingga memudahkan untuk melakukan perhitungan berdasarkan rumus-rumus statistik dan pembuatan grafik.

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data yaitu :

a. Analisis Kualitatif

yaitu analisis yang digunakan untuk mengolah data yang berwujud kasus atau gejala yang tidak dapat diukur dengan angka, misalnya struktur organisasi, tata kerja dan lainnya.

b. Analisis Kuantitatif

yaitu analisis yang digunakan untuk mengelolah data yang memerlukan pengukuran, sehingga analisis ini sering disebut analisis data statistik yang mampu memperlihatkan hasil yang cermat.

### 3. Alat analisis data

#### a. Analisis proporsi

Analisis ini biasanya menggunakan tabel tunggal yang dalam penelitian ini menguraikan atau membahas mengenai hasil-hasil penelitian dimulai dari variabel independen, yakni perumusan kebijaksanaan ( $X_1$ ) dengan indikator-indikatornya dan variabel Pembinaan OPKB ( $X_2$ ) dengan indikator-indikatornya.

$X_1$  : Perumusan Kebijakan, dengan indikator-indikatornya :

- Penyelenggaraan Operasional
- Kapasitas pemerintah
- Esensi Kebijakan

$X_2$  : Pembinaan OPKB, dengan indikator-indikatornya :

- Pembinaan
- Bina usaha

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan ( $Y$ ) dengan indikator-indikatornya yaitu :

$Y$  : Motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan, dengan indikator-indikatornya :

- Motif
- Pengharapan

#### b. Analisis hubungan antar variabel

Analisis ini biasanya menggunakan tabel silang. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian dimulai dari :

- 1) Hubungan antara perumusan kebijakan dan motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan;
- 2) Hubungan antara pembinaan OPKB dengan motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan;
- 3) Hubungan antara perumusan kebijakan dan pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan;

c. Analisis Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dengan menggunakan rumus :

- 1) Koefisien Korelasi Rank Kendal
- 2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perumusan kebijaksanaan terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan.
- 3) Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan.

Adapun rumus korelasi rank Kendall adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{S}{\sqrt{0,5N(N-1) - t_x} \sqrt{0,5N(N-1) - t_y}}$$

dimana :

N = banyaknya objek atau individu yang diurutkan pada x dan y

S = skor sebenarnya, yaitu selisih nilai positif dan nilai negatif.

$0,5N(N-1)$  = kemungkinan skor maksimum kombinasi.

$t_x = t_y$  = korelasi faktor  $0,5 t(t-1)$ .

Untuk menguji signifikansi yaitu setelah mengetahui hasil korelasi rank Kendall, maka uji signifikansinya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{T}{\frac{2(2N+5)}{9n(N-1)}}$$

keterangan :

- 1)  $H_0$  ditolak jika harga  $z < 1,96$  untuk 5% ( $\alpha = 0,05$ ).
- 2)  $H_0$  diterima jika harga  $z > 1,96$  untuk alfa 5% ( $\alpha = 0,05$ )
- 3) Koefisien Konkordasi Kendal (W)

Untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari dua variabel atau lebih digunakan rumus sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{1/12 K^2 (N^3 - N)}$$

$S$  merupakan jumlah deviasi kuadrat yang diperoleh antara hasil pengamatan terhadap nilai mean-nya ( $R_j$ ), dimana mean memakai rumus :

$$\text{Mean} = \frac{\sum R_j}{N}$$

#### d. Koefisien Korelasi Parsial Rank Kendall

Tujuan menggunakan koefisien korelasi rank Kendall ini untuk mengetahui kemurnian atau keaslian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dimana satu variabel yang lain dikontrol atau dihilangkan.

Adapun rumusannya sebagai berikut ;

$$\begin{aligned} 1 \dots T_{x_1 y \cdot x_2} &= \frac{x_1 y - (x_2 y) (x_1 x_2)}{(1 - x_2 y) (1 - x_1 x_2)} \\ 2 \dots T_{x_2 y \cdot x_1} &= \frac{x_2 y - (x_1 y) (x_1 x_2)}{(1 - x_1 y) (1 - x_1 x_2)} \end{aligned}$$

Keterangan :

$T_{x_1y.x_2}$  = koefien korelasi antara  $x_1$  dengan  $y$  dimana variabel  $x_2$  dikontrol atau dihilangkan.

$T_{x_2y.x}$  = koefien korelasi antara  $x_2$  dengan  $y$  dimana variabel  $x_1$  dikontrol atau dihilangkan

Koefisien korelasi rank Kendall juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan satu variabel dependen.

Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$T_{y(1,2)} = \sqrt{1 - (1 - x_1y)(1 - x_2y.x_1)}$$

#### e. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar prosentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama digunakan rumus Koefisien determinan. Dengan rumus determinan diharapkan peneliti mampu mendeskripsikan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari variabel yang diteliti dan besarnya pengaruh yang berasal dari luar variabel yang diteliti, sehingga menjadi bahan masukan untuk peneliti-peneliti lainnya yang akan mengupas dan mengkaji hasil penelitian.

Adapun rumusnya sebagai berikut.

$$KD^2 = (x_1x_2)^2 + (x_1x_2y)(1(x_1x_2))$$

Untuk mengetahui hubungan antara variabel  $X$  dan  $Y$  digunakan rumus :

$$T = \frac{S}{N(N-1)^{1/2}}$$

Untuk menguji  $H_0$  dengan menghitung nilai  $Z$ , dengan rumus sebagai berikut

:

$$Z = \frac{T}{\frac{2(2N + 5)}{9n(N - 1)}}$$

#### K. Jadual Penelitian

KEGIATAN	BULAN / MINGGU															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pra survey																
Penyusunan proposal																
Terjun lapangan (mencari data)																
Penyusunan laporan																

UPT-PUSTAK-UNDIP

## **BAB IV**

### **TINJAUAN UMUM KOTA SEMARANG**

#### **A. Tinjauan Umum Kota Semarang**

Kota Semarang telah dikenal sejak pemerintahan Demak-panjang, hingga sekarang ini. Pada masa awal pemerintahan Kerajaan Demak, Kyai Pandan Arang, Sunan Tembayat, ditunjuk menjadi Bupati Semarang pertama dan meresmikan Tiang Amper sebagai pusat kegiatan penyiaran agama Islam dikawasan Semarang pada waktu itu meliputi : Inderono, Gisik Drono, Tiang Amper, Jurug Sewu, Labuapi, Tinjomoyo, Watgalih, Gajah Mungkur, Sejalino dan Gedung Batu.

Pada periode tahun 1500 – 1700 Kota Semarang mulai dikenal oleh orang-orang yang singgah dipelabuhan Semarang, sebagai pedagang. Status kawasan yang semula dibawah sunan Surakarta akhirnya berubah menjadi daerah kekuasaan Belanda. Dan karena letaknya yang strategis, pada tahun 1768 kota Semarang dijadikan tempat pertahanan militer dan daerah kekuasaan Belanda. Kemudian untuk kepentingan politik kolonial Belanda, Semarang dijadikan kota kedua setelah Batavia (Jakarta). Pada tahun 1700-1906, Semarang mulai menampakkan dirinya sebagai bentuk kota. Wilayah pemukimannya semakin luas dengan masuknya kampung Jawa dan Kaligawe, Pengapon, Ponjol, Kampung Cina sekitar Bubakan dan kampung Melayu Barat. Kehidupan sosial masyarakat kota Semarang pada masa itu didominasi oleh kegiatan perniagaan dan pertahanan militer untuk kepentingan Belanda (VOC). Fasilitas sosial yang ada pada waktu itu meliputi : Masjid, gereja, surau, klenteng, pasar serta jalan untuk lingkungan. Sedangkan untuk jalur transportasi masih menggunakan alur kali Semarang dan cabang-cabangnya. Peristiwa penting yang terjadi pada masa itu adalah pelantikan Bupati Semarang pada tanggal 6 Juni 1704.

Bupati itu adalah Kyai Adipati Surahadi Manggolo IV menjadi Bupati Semarang ke-21 (1973-1978:4)

Pada pertengahan abad 18, perkembangan kota Semarang semakin pesat yaitu dengan tumbuhnya perkantoran-perkantoran pemerintahan Belanda, kantor-kantor dagang dan fasilitas-fasilitas sosial. Dengan demikian pemerintahan pada masa itu terdiri dari pemerintahan pribumi dan pemerintah Gubernur Belanda didalam bentuk kota yang bernama Gubernur Jenderal Jawa Utara. Lebih dari dua abad Semarang bertahan dengan pusat pemerintahan Belanda di Jawa Tengah yaitu semenjak Gubernur Jawa Utara menjadi Semarang sebagai daerah pemerintahan dan sekaligus sebagai daerah kemiliteran dan daerah perdagangan dunia. Pelabuhan Semarang pada waktu itu juga mampu mengambil alih peranan pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa Tengah. Posisi komersial yang sangat menonjol disebabkan oleh fungsinya sebagai pelabuhan ekspor hasil bumi, impor produk barang-barang dari luar semakin mantap.

Pada tahun 1864 Nderland Indische Spoorwagen (NIS) membangun jalan kereta api yang pertama kali di Indonesia jurusan Semarang-Yogyakarta dengan stasiunnya di Tambak Sari. Kemudian pada tahun 1872 dibangun jalan kereta api Semarang – Karang Jati dan Solo, dengan pertimbangan bahwa transportasi yang semakin pesat, tahun 1900 jumlah ekspor semakin meningkat, maka jaringan kereta api ditambah, yaitu Semarang – Juana dan Semarang – Cirebon .

Dengan adanya peninggalan-peninggalan kuno dan tempat-tempat bersejarah seperti Gedung Lawang Sewu, Gereja Blenduk, Klenteng Gang Lombok, Gedung Batu, Stasiun Tawang, kesemuanya menunjukkan bahwa kota Semarang sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa pada tanggal 2 Mei 1547, telah dilantik Kyai Arang II (Putra Kyai Pandan Arang I) menjadi Bupati Semarang oleh pemerintahan Demak. Berdasarkan



monentum itulah maka pada tanggal 2 Mei ditentukan sebagai hari jadi kota Semarang. Pada pertengahan abad XIX kota Semarang dianggap penting dan strategis oleh Belanda, karena letaknya ditengah-tengah lalu lintas perekonomian pulau Jawa. Tidaklah mengherankan bila pada saat telah muncul gedung-gedung arsitektur bergaya Eropa di Semarang yaitu dijalan Bonong yang saat ini dikenal dengan jalan Pemuda. Termasuk adanya fasilitas telepon yang dapat melakukan komunikasi sampai ke Surabaya dan Jakarta. Yang penting untuk dicatat adalah pada tahun 1884 telah dibangun kantor pos Semarang pertama dipulau Jawa sebelum Surabaya dan Batavia. Periode tahun 1906-1942, Semarang menjadi Kotapraja (*stadsgemeente van Semarang*) yang diresmikan pada tanggal 1 April 1906. Sejak saat itu Semarang terlepas dari pemerintahan Kabupaten Semarang dan memiliki batas kekuasaan pemerintahan kotapraja, maka pada tanggal 19 Juni 1976 kota Semarang dimekarkan sampai kewilayah Gunung Pati, Mijen, Tugu dan Genuk serta Tembalang.

### 1. Letak Geografis

Letak geografisnya kota Semarang terletak di pantai Utara Jawa Tengah dengan posisi lintang selatan 6° 50' sampai dengan 7° 10' dan bujur timur antara 109° 50' sampai dengan 110° 35' dengan luas keseluruhan 132.759 ha. Relevansi letak geografis ini dengan pelaksanaan pembangunan yaitu diusahakannya tercapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, maka segenap kondisi dan potensi daerah yang merupakan faktor-faktor dominan hendaknya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memperlancar pencapaian sasaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi

Disamping keadaan daerah seperti letak geografis, luas wilayah, topografi, maka kondisi sosial ekonomi masyarakat juga sangat menunjang keberhasilan pembangunan. Sedangkan kondisi alam Kotamadya Semarang meliputi unsur lahan daratan, lautan dan daerah pegunungan yang ditunjang oleh iklim dan curah hujan yang memadai, merupakan faktor yang dominan penunjang tumbuh kembangnya perekonomian. Demikian pula letaknya yang strategis, lalu lintas yang ramai baik darat, laut dan udara dari arah barat, timur, utara dan selatan atau sebaliknya serta tersedianya sarana perhubungan yang dimiliki, terminal induk Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang, pelabuhan samudera Tanjung Mas, dan Lapangan Udara Ahmad Yani, telah membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Semarang. Karena arus lalu lintas barang dan penumpang semakin lancar. Selain itu jumlah penduduk yang saat ini 1.251.845 jiwa lebih merupakan modal penunjang keberhasilan di bidang perekonomian. Ini berarti terjadinya angkatan kerja dengan jumlah yang besar pula. Dengan demikian pemerintahan kota Semarang selalu berusaha menggali potensi mantap dan terkendali merupakan suatu syarat kelancaran dan peningkatan pembangunan di segala bidang.

Faktor lainnya yang mendukung adalah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang selalu meningkat rata-rata 10% setiap tahunnya. Dari sebesar Rp. 72.447.660.000,- tahun 1990-1991 menjadi Rp. 32.295.096.000,- Ini membuktikan bahwa semakin tingginya tingkat kemandirian kota Semarang dalam membangun daerahnya, khususnya bidang ekonomi. Dana investasi sebesar Rp. 1.886.906.292,- lebih konkrit sehingga peran pihak swasta dalam membangun perekonomian kota Semarang dan mampu menyalurkan tenaga

kerja sebesar 32.487 orang. Dari pendapatan per kapita mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.117.174,- pada tahun 1989 menjadi Rp. 2.101.838,- pada tahun 1995, dengan demikian pendapatan perkapita masyarakat Semarang mengalami peningkatan 16,9 % per tahun atas harga tetap (Pemda Kota Semarang, 1973-1978 :4).

## **B. Program Penanggulangan Dampak Pengangguran Subsidi Energi (PPD-PSE)**

### **Bidang Pangan**

Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Program Penanggulangan Dampak Pengangguran Subsidi Energi (PPD-PSE) Bidang Pangan yang berasal dari dana kompensasi subsidi energi APBN Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 279,9 milyar. Untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah, yang jumlah keluarga miskinnya (KK) 2.801.838, untuk alokasi Operasi Pasar Khusus (OPK) secara rutin 303.800 ton. Khusus wilayah kota Semarang Januari hingga Oktober (10 bulan) sejumlah 5.343.400 kg. (Dolog Jateng 2001)

## BAB V

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah data yang memberikan jawaban dari semua permasalahan yang diajukan dalam laporan hasil penelitian yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang telah dikemukakan di muka.

Data yang diperoleh dari sejumlah pertanyaan yang dijabarkan dari masing-masing variabel :

#### A. Analisis Proporsi

##### 1. Identifikasi Kebijakan

Pelaksanaan operasional OPKB merupakan pelaksanaan lima tepat Program Operasi Pasar Khusus, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat penyebaran.

Untuk mengetahui pelaksanaan program dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 5.1 Tingkat Perhatian Pemerintah Terhadap Kebutuhan Pokok Masyarakat**

No	Pemenuhan kebutuhan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak sama sekali	66	68,75
2	Belum cukup	27	28,12
3	Cukup	3	3,13
4	Cukup sekali	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 11

Dari Tabel 5.1. di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok yang mengatakan belum cukup sebanyak 27 orang atau 28,75%, yang mengatakan cukup 3 orang atau 3,13%.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat bawah (miskin) dalam memenuhi kebutuhan pokok belum cukup, untuk itu Pemerintah harus ikut serta membantu dalam menyelesaikan problem kehidupan masyarakat bawah.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat perhatian pemerintah terhadap hubungan dengan masyarakat dapat dilihat dalam Tabel 5.2. berikut :

**Tabel 5.2 Tingkat Perhatian Pemerintah Terhadap Hubungan dengan Masyarakat.**

No	Perhatian Pemerintah	Jumlah	Prosentase
1	Selalu	30	32,25
2	Sering	15	15,62
3	Kadang-kadang	42	43,75
4	Tidak pernah	9	9,37
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.12

Dari data dalam Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 42 orang atau 43,75% menyatakan bahwa Pemerintah kadang-kadang memberikan perhatian terhadap masyarakat, menyatakan selalu sebanyak 30 orang atau 31,25 % , menyatakan sering sebanyak 15 orang atau 15,62 % dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 9 orang atau 9,37%. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah cukup mempunyai perhatian terhadap masyarakat.

Untuk mengetahui apakah pemerintah juga memberikan faktor pendorong bagi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilihat dalam Tabel 5.3.

**Tabel 5.3 Tingkat Pemberian Faktor Pendorong Untuk Menanggulangi Kemiskinan**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Selalu memberi	3	3
2	Sering memberi	12	12,5
3	Kadang-kadang memberi	63	65,62
4	Tidak pernah memberi	18	18,75
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 13

Dari Tabel 5.3 di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah juga memberi dorongan kepada masyarakat untuk mengikuti menanggulangi kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan jawaban dari 96 responden sebagian besar menjawab kadang-kadang memberikan faktor pendorong yaitu 63 responden atau 65,62 %.

Untuk dapat memberikan faktor pendorong kepada masyarakat dengan baik, maka diperlukan suatu hubungan yang baik pula antara pemerintah dengan penduduk.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah dalam memecahkan masalah dapat dilihat melalui Tabel 5.4 berikut :

**Tabel 5.4 Tingkat Kemampuan Pemerintah dalam Memecahkan Masalah**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Mampu sekali	84	87,5
2	Cukup mampu	3	3
3	Kurang mampu	0	0
4	Tidak mampu	9	9,37
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.21

Dari Tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menyatakan bahwa pemerintah mampu menyelesaikan masalah dalam masyarakat

dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa sebagian responden menjawab pemerintah mampu menyelesaikan masalah di masyarakat, yaitu sebanyak 84 orang atau 87,5%.

Kemudian untuk mengetahui Tingkat keluasaan pandang sosial, sehingga pemerintah tidak selalu yang benar, dapat dilihat dalam Tabel 5.5 berikut :

**Tabel 5.5 Tingkat Keluasan Pandang Sosial terhadap Pemerintah**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Bersedia	87	90,63
2	Cukup bersedia	0	0
3	Kurang bersedia	0	0
4	Tidak bersedia	9	9,37

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 23

Dari Tabel 5.5 di atas dapat diketahui bahwa pemerintah mampu bergaul dengan penduduk dengan baik dan bukan bersikap diktator. Hal ini dibuktikan jawaban responden yang menjawab pemerintah bersedia menerima kritik atas kesalahan sebanyak 87 atau 90,63%.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pemberian informasi tentang program penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dalam Tabel 5.6 berikut :

**Tabel 5. 6. Tingkat Pemberian Informasi Tentang Program Kemiskinan oleh Pemerintah**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Selalu memberi	6	6,25
2	Sering memberi	0	0
3	Kadang-kadang memberi	87	90
4	Tidak pernah memberi	3	3,13
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.26

Dari Tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa pemerintah juga memberikan informasi tentang program penanggulangan kemiskinan walaupun dilakukan tidak rutin. Hal ini dapat diketahui dari 96 responden 87 orang atau 90,62 % menyatakan kadang-kadang Pemerintah memberikan informasi tentang program penanggulangan kemiskinan.

## 2. Variabel Pembinaan OPKB

Kemudian untuk mengetahui bentuk-bentuk pembinaan dalam melaksanakan program OPKB, dapat dilihat pada Tabel 5. 7 berikut :

**Tabel 5. 7 Bentuk-Bentuk Pembinaan**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Ketiga hal tersebut	45	46,87
2	Dua dari tiga hal tersebut	48	50
3	Salah satu	3	3,13
4	Lainnya .....	0	0
	Jumlah	96	100

Suber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 28

Keterangan :

1. Ceramah
2. Siraman rohani
3. Diskusi

Dari Tabel 5. 7 dapat diketahui bahwa sebagian besar bentuk pembinaan yang dilaksanakan yaitu ceramah dan sirahman rohani, ceramah dan diskusi, sirahman rohani dan diskusi. Hal ini dibuktikan dari pendapat 96 responden 48 orang atau 50% menyatakan bentuk pembinaan yaitu cerahma dan sirahman rohani, ceramah dan diskusi, siraman rohani dan diskusi.

Selajutnya untuk mengetahui frekuensi pembinaan manusia yang dilaksanakan dapat dilihat melalui Tabel 5. 8 sebagai berikut :



Tabel 5. 8. Frekuensi Pembinaan

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Lebih dari 1 kali sebulan	45	46
2	1 bulan sekali	48	50
3	3 bulan sekali	3	3,13
4	6 bulan sekali	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 29

Dilihat data dalam Tabel 5.8 dapat diketahui bahwa frekuensi pembinaan yang dilakukan dengan baik yaitu satu bulan sekali. Hal ini dapat dibuktikan 48 orang atau 50 %.

Selanjutnya untuk mengetahui teknik-teknik yang digunakan dalam pembinaan , dapat diketahui dalam Tabel 5. 9 sebagai berikut :

Tabel 5. 9 Teknik-Teknik Pembinaan

No	Kategori	Jumlah	Prosentasi
1	Tatap muka dan melalui brosur	3	3,125
2	Tatap muka langsung	90	93,75
3	Melalui brosur/tulisan	3	3,125
4	Tidak tahu	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.30

Dari Tabel 5.9 tersebut dapat diketahui jawaban responden yang diteliti 90 orang atau 93,75 % menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan yaitu dengan tatap muka langsung. Jadi dalam melaksanakan pembinaan dilakukan dengan cara pertemuan antara pembinaan dengan yang dibina dalam suatu waktu tertentu.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keteraturan/ ketepatan waktu pembinaan dapat dilihat dalam Tabel 5. 10 berikut :

Tabel 5.10 Tingkat Ketepatan/Keteraturan Waktu Pembinaan

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat tepat	0	0
2	Cukup tepat	21	21,875
3	Kurang tepat	57	59,375
4	Tidak tepat	18	18
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.31

Dari Tabel 5.10 tersebut dapat diketahui waktu pembinaan sering tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Artinya pembinaan tersebut kadang-kadang kala dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, tetapi suatu saat pembinaan ini bisa diajukan atau diundur waktu pelaksanaannya karena suatu alasan tertentu. Hal ini terbukti dari 96 responden yang diteliti 57 orang atau 59,375% menyatakan bahwa pembinaan yang dilaksanakan kadang-kadang tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selanjutnya untuk mengetahui bentuk-bentuk bina usaha dapat dilihat melalui Tabel 5.11 berikut :

Tabel 5.11 Bentuk-Bentuk Pembinaan

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Peminjaman modal dan penyuluhan	0	0
2	Penyuluhan	84	87,5
3	Peminjaman modal	3	3,13
4	Lain-lain	9	9,37
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.35

Dilihat data dalam Tabel 5.11 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang diteliti sebanyak 96 responden 84 orang atau 87,5% menyatakan

bentuk dari pembinaan yaitu pemberian modal, penyuluhan terhadap bentuk usaha. Jadi dalam pemberian usaha yang dilaksanakan berbentuk pemberian modal dan juga penyuluhan terhadap bentuk usaha.

Selanjutnya untuk mengetahui intensitas pemantauan terhadap usaha-usaha masyarakat dapat dilihat dalam Tabel 5.12 berikut :

**Tabel 5.12 Tingkat Ketepatan / Keteraturan Waktu Pembinaan**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat tepat waktu	36	37,5
2	Cukup tepat waktu	60	62,5
3	Kurang tepat waktu	0	0
4	Tidak tepat waktu	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 37

Dari data Tabel 5,12 dapat diketahui bahwa 60 orang atau 62,5% responden dari 96 responden yang diteliti menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan adalah cukup tepat waktu. Maksudnya bahwa pembinaan sering dilakukan pemerintah dalam mensukseskan program OPKB.

Selain tingkat ketepatan waktu pembinaan, untuk mengetahui tentang tingkat pemantauan petugas juga membantu mengatasi kesulitan dalam pengelolahan modal. Hal ini dapat kita lihat dalam Tabel 5.13 berikut ini :

**Tabel 5.13 Tingkat Pemantauan terhadap Pelaksanaan Program**

	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	0	0
2	Cukup baik	63	65,6
3	Kurang baik	27	28,1
4	Tidak baik	6	6,3
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.39

Dari Tabel 5.13 di atas dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti 63 orang atau 65,6 % menyatakan bahwa petugas dalam melakukan pemantauan pelaksanaan program cukup baik. Jadi artinya bahwa dalam persepsi masyarakat, penyelenggaraan pembinaan OPKB cukup dipantau dalam praktek di lapangan, sehingga kejanggalan-kejanggalan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan segera mendapat perhatian untuk diperbaiki.

Sedangkan tingkat kemauan petugas dalam melakukan pembinaan dapat dilihat dalam Tabel 5.14 berikut :

**Tabel 5. 14 Tingkat Kemauan Petugas dalam Melakukan Pembinaan**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat berkemauan	39	40,6
2	Cukup berkemauan	36	37,5
3	Kurang berkemauan	21	21,9
4	Tidak mau	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 40

Dari Tabel 5.14 diatas maka terdapat 96 responden dimana ada 39 responden atau 40,6% menyatakan bahwa banyak petugas yang menyatakan sangat berkemauan, dan 36 (37,5%) responden menyatakan cukup berkemauan dalam melaksanakan pembinaan OPKB. Ini berarti bahwa dalam persepsi masyarakat, tingkat kemauan petugas dalam melaksanakan pembinaan cukup tinggi. Dengan kata lain, semangat pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan cukup tinggi (78,1%).

Sedangkan untuk mengetahui tentang tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan bina usaha sebagai berikut:

Tabel 5.. 15. Tanggapan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Bina Usaha

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat memuaskan	9	9,37
2	Memuaskan	45	46,87
3	Kurang memuaskan	36	37,5
4	Tidak memuaskan	6	6,25
	Jumlah	96	100

Suber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.43

Dari 5.15 dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti terdapat 45 orang atau 46,87% yang menyatakan bahwa melaksanakan pembinaan usaha yang dilakukan oleh petugas dirasakan dapat memuaskan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya responden yang mengerti dan merasakan puas atas pembinaan usaha yang dilakukan oleh petugas.

### c. Variabel Motivasi

Untuk mengetahui motivasi penduduk dalam mengikuti Program Penanggulangan Kemiskinan, dapat dilihat dalam Tabel 5.16 berikut :

Tabel 5.16 Tingkat Keinginan Penduduk Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat berkeinginan	78	81,25
2	Berkeinginan	18	18,75
3	Kurang berkeinginan	0	0
4	Tidak berkeinginan	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : diolah dari jawaban pertanyaan no.45

Dari data Tabel 5.16 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk sangat berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan.

keluarga. Hal ini dibuktikan bahwa dari 96 responden terdapat 78 responden atau 81,25% yang menyatakan sangat berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Jadi dapat dikatakan bahwa semua penduduk berkeinginan meningkatkan pendapatan keluarga sehingga diharapkan kesejahteraan keluarga akan meningkat pula.

Selanjutnya untuk pemberian informasi dan bimbingan terhadap keinginan responden untuk menanggulangi kemiskinan, dapat dilihat dalam Tabel 5.17 sebagai berikut :

**Tabel 5.17 Pemerintah Dalam Memberi Binaan**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat berkeinginan	12	12,5
2	Berkeinginan	57	59,37
3	Kurang berhasil	27	28,13
4	Tidak berhasil	0	5
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.46

Dari Tabel 5.17 dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti terdapat 57 responden atau 59,37 % yang menyatakan Pemerintah dan pembinaan OPKB mempengaruhi motivasi penduduk untuk mengikuti program penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut di atas juga akan mempengaruhi keyakinan penduduk bahwa dengan mengikuti program penanggulangan kemiskinan maka penghasilan keluarga akan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.18 berikut:

**Tabel 5.18 Tingkat Keyakinan Responden Dengan Mengikuti Program Penanggulangan Kemiskinan Akan Meningkatkan Pendapatan Keluarga**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat yakin	12	12,5
2	Yakin	60	62,5
3	Kurang Yakin	24	25
4	Tidak yakin	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no 47

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden yakin bahwa dengan mengikuti program penanggulangan kemiskinan maka penghasilan keluarga akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 60 responden atau 62,5% dari 96 responden yang diteliti menyatakan yakin dengan mengikuti program penanggulangan kemiskinan akan meningkat pendapatan keluarga.

Dengan adanya peningkatan pendapatan keluarga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Hal dapat dilihat dalam Tabel 5.19 berikut :

**Tabel 5. 19 Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat yakin	18	18,75
2	Yakin	78	81,25
3	Kurang yakin	0	0
4	Tidak yakin	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no 48

Dari Tabel 5.19 dapat diketahui bahwa dari 96 responden terdapat 78 responden atau 81,25 % yang menyatakan bahwa mereka dengan peningkatan

pendapatan keluarga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk sangat berkeinginan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha agar pendapatan mereka meningkat sehingga kesejahteraan keluarga akan meningkat pula.

Dengan adanya pinjaman modal usaha penduduk akan mampu menciptakan suatu usaha dan tingkat keyakinan akan berhasil dalam melaksanakan suatu usaha dapat dilihat dalam Tabel 5.20 berikut :

**Tabel 5.20 Tingkat Keyakinan Penduduk Akan Berhasil Dalam Suatu Usaha Dengan Pinjaman Modal**

No	Kategori	Jumlah	Presentase
1	Sangat yakin	3	3,13
2	Yakin	72	75
3	Kurang yakin	21	21,87
4	Tidak yakin	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no. 49

Dari data Tabel 5.20 dapat diketahui bahwa penduduk yakin berhasil dalam usaha, hal ini terbukti dengan adanya 72 responden dari 96 responden yang diteliti menyatakan yakin akan berhasil dalam suatu usaha. Karena dengan adanya pinjaman modal berarti penduduk mendapatkan modal untuk melakukan suatu usaha dan dapat berjuang untuk keberhasilan usahanya.

Berkaitan dengan hal diatas penduduk akan merasa senang mendapatkan pinjaman modal usaha. Untuk lebih mengetahui tentang tanggapan penduduk apabila mendapat pinjaman modal dapat dilihat dalam Tabel 5.21 berikut :



**Tabel 5.21 Tanggapan Penduduk Apabila Mendapat Pinjaman Modal Usaha**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat senang	36	37,5
2	Senang	57	59,37
3	Agak senang	3	3,13
4	Tidak senang	0	0
	Jumlah	96	100

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no 50

Dari Tabel 5.21 di atas dapat diketahui dari 96 responden, 57 responden atau 59,37% yang merasa senang apabila mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pinjaman modal usaha akan sangat menggembirakan penduduk.

Berkaitan dengan hal di atas dimana penduduk kebanyakan merasa senang apabila mendapatkan pinjaman untuk menciptakan suatu usaha yang akan meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan demikian penduduk akan merasakan manfaat dari program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5.22 berikut:

**Tabel 5.22 Manfaat Yang Dirasakan oleh Penduduk Dalam Mengikuti Program Penanggulangan Kemiskinan**

No	Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Sangat merasakan	9	9,37
2	Cukup merasakan	57	59,37
3	Kurang merasakan	30	31
4	Tidak merasakan	0	0
	Jumlah	96	100%

Sumber data : Diolah dari jawaban pertanyaan no.52

Dari Tabel 5.22 dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti terdapat 57 responden atau 59,37% responden yang merasakan manfaat dari mengikuti program penanggulangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari adanya program penanggulangan kemiskinan yang mereka ikuti.

## **B. Analisis Tabulasi Silang**

### **1. Hubungan Antara Perumusan Kebijakan dan Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi Kemiskinan**

Untuk mengetahui hubungan antara Perumusan Kebijakan dan motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan, dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut ini

**Tabel 5.23 Hubungan Tingkat Perhatian Pemerintah Mengenai Program OPKB Dengan Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi Kemiskinan**

X	Selalu memberi pengarahan	Sering memberi Pengarahan	Kadang-kadang memberi pengarahan	Tidak pernah sesberi pengarahan	$\Sigma$
Y					
Sangat mem-pengaruhi	6 (20%)	0	3 (7,14X)	3 (33,33%)	12 (12,5%)
Mempenga-ruhi	24 (80%)	6 (40%)	24 (57,14%)	3 (33,33%)	57 (59,3%)
Kurang sespengaruhi	0	9 (60%)	15 (35,72%)	3 (33,33%)	27 (28,2%)
Tidak mem-pengaruhi	0	0	0	0	0
$\Sigma$	30 (100%)	15 (100%)	42 (100%)	9 (100%)	96 (100%)

Sumber Data : Pertanyaan No. 12 dan No. 46

Dari Tabel 5.23 di atas dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti 30 responden menyatakan pemerintah selalu memberi pengarahan

Tentang Program penanggulangan kemiskinan dimana dari 30 responden tersebut terdapat 24 (80%) responden yang menyatakan bahwa pengarahan pemerintah tentang program penanggulangan kemiskinan tersebut menyebabkan penduduk semakin berkeinginan untuk menanggulangi kemiskinan.

Hal ini karena adanya kepercayaan penduduk terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah serta adanya keinginan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara pemberian dorongan dan penyampaian informasi oleh petugas dengan keinginan penduduk untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 5.24 berikut.

**Tabel 5.24 Hubungan Pemberian Dorongan Oleh Pemerintah Dengan Keyakinan Responden Dengan Mengikuti Penanggulangan Kemiskinan Akan Meningkatkan Pendapatan Keluarga**

X	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	$\Sigma$
Y					
Sangat yakin	0	3 (25%)	9 (14,28%)	0	12 (12,5%)
Yakin	3 (100%)	6 (50%)	33 (52,38%)	18 (100%)	60 (62,5%)
Kurang yakin	0	3 (25%)	21 (33,33%)	0	24 (25%)
Tidak yakin	0	0	0	0	0
$\Sigma$	3 (100%)	12 (100%)	63 (100%)	18 (100%)	96 (100%)

Sumber Data : Pertanyaan No. 13 dan No. 47

Dari Tabel 5.24 di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah 96 responden yang diteliti terdapat 63 responden yang menyatakan bahwa pemerintah kadang-kadang memberi dorongan bagi masyarakat untuk mengikuti program penanggulangan kemiskinan, dimana dari 63 responden tersebut terdapat 33 (52,38%) responden yang menyatakan bahwa responden yakin dengan mengikuti program penanggulangan kemiskinan akan meningkatkan pendapatan keluarga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemerintah benar-benar memberikan keyakinan pada masyarakat akan arti pentingnya menanggulangi kemiskinan sehingga masyarakatpun berkeinginan menanggulangi kemiskinan, dengan keyakinan bahwa dengan menanggulangi kemiskinan maka pendapatan keluarga akan meningkat.

## **2. Hubungan antara Pembinaan OPKB dengan Motivasi Penduduk untuk Menanggulangi Kemiskinan**

Untuk mengetahui hubungan antara Pembinaan OPKB dengan motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut

**Tabel 5.25 Hubungan Pelaksanaan Bina Manusia Dengan Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi Kemiskinan**

Y	X	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Kurang memuaskan	Tidak memuaskan	$\Sigma$
Sangat mempengaruhi		0	6 (14,28%)	3 (6,25%)	3 (100%)	12 (12,5%)
Mempengaruhi		0	24 (57,14%)	33 (68,75%)	0	57 (59,3%)
Kurang mempengaruhi		3 (100%)	12 (28,57%)	12 (25%)	0	27 (28,2%)
Tidak mempengaruhi		0	0	0	0	0
$\Sigma$		3 (100%)	42 (100%)	48 (100%)	3 (100%)	96 (100%)

Sumber Data : Pertanyaan No. 33 dan No. 46

Dari Tabel 5.25 di atas dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti terdapat 48 responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan bina manusia kurang memuaskan bagi penduduk, dimana dari 48 responden tersebut terdapat 33 (68,75%) responden yang menyatakan bahwa bimbingan oleh petugas OPKB menyebabkan penduduk semakin berkeinginan untuk menanggulangi kemiskinan.

Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya bimbingan dari petugas OPKB memang menyebabkan masyarakat menjadi berkeinginan untuk menanggulangi kemiskinan walaupun pelaksanaan bimbingan tersebut kurang memuaskan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk mengetahui hubungan bentuk-bentuk bina usaha yang dilaksanakan dengan keyakinan responden dengan mengikuti program penanggulangan kemiskinan akan meningkatkan pendapatan keluarga dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.26 Hubungan Bentuk-Bentuk Bina Usaha Dengan Keyakinan Responden Dengan Menanggulangi Kemiskinan Akan Meningkatkan Pendapatan Keluarga**

Y	X	A	B	C	D	$\Sigma$
Sangat Yakin		12 (10,71%)	0	3 (33,33%)	0	12 (12,5%)
Yakin		48 (64,29%)	3 (100%)	3 (33,33%)	0	54 (62,5%)
Kurang Yakin		21 (25%)		3 (33,33%)	0	24 (21,87%)
Tidak yakin		0	0	0	0	0
$\Sigma$		84 (100%)	3 (100%)	9 (100%)	0	96 (100%)

Sumber Data : Pertanyaan No. 35 dan No. 47

Keterangan

X : Bentuk-bentuk bina usaha yang dilakukan

A : Pemberian kredit dengan bunga lunak, penyuluhan terhadap bentuk usaha

B : Penyuluhan terhadap bentuk usaha, pemberian peminjaman modal dengan bunga tinggi

C : Pemberian peminjaman modal tidak melakukan penyuluhan

D : Lainnya...

Dari Tabel 5.26 di atas dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti, 84 responden yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk dalam pembinaan manusia adalah pemberian peminjaman modal dan penyuluhan terhadap bentuk usaha, dimana dari 84 responden terdapat 54 (64,29) responden yang menyatakan yakin dengan menanggulangi kemiskinan akan meningkatkan pendapatan keluarga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pinjaman modal usaha dari program penanggulangan kemiskinan responden mempunyai modal untuk melaksanakan suatu usaha dan yakin akan berhasil serta akan meningkatkan pendapatan keluarga.

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara bentuk-bentuk bina usaha dengan keyakinan penduduk akan berhasil dalam melaksanakan suatu usaha dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.27 Hubungan Bentuk-Bentuk Bina Usaha dengan Keyakinan Responden Akan Berhasil Dalam Suatu Usaha**

Y	X	A	B	C	D	$\Sigma$
Sangat Yakin		3 (3,57%)	0	0	0	3 (3,13%)
Yakin		60 (71,43%)	3 (100%)	9 (100%)	0	72 (75%)
Kurang Yakin		21 (25%)	0	0	0	21 (21,87%)
Tidak yakin		0	0	0	0	0
$\Sigma$		84 (100%)	3 (100%)	9 (100%)	0	96 (100%)

Sumber Data : Pertanyaan No. 35 dan No. 49

**Keterangan**

X : Bentuk-bentuk bina usaha yang dilakukan

A : Pemberian peminjaman modal, penyuluhan terhadap bentuk usaha

B : Penyuluhan terhadap bentuk usaha, pemberian pinjaman modal

C : Pemberian peminjaman modal, tidak melakukan penyuluhan

D : Lainnya

Dari Tabel 5.27 di atas dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti terdapat 84 responden yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk dalam pembinaan

pembinaan manusia adalah pemberian pinjaman modal dan penyuluhan terhadap bentuk usaha, dimana dari 84 responden tersebut terdapat 60 (71,43%) responden yang menyatakan bahwa yakin dengan adanya pinjaman modal dari program penanggulangan kemiskinan akan berhasil dalam suatu usaha.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pinjaman modal usaha dari program penanggulangan kemiskinan penduduk menjadi yakin akan berhasil dalam suatu usaha karena mereka mendapatkan modal untuk berusaha, dan akan benar-benar serius dalam melaksanakan usahanya.

### **3. Hubungan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan OPKB dengan Motivasi Panduduk Untuk Menanggulangi Kemiskinan**

Untuk mengetahui hubungan tingkat perhatian pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan dan tanggapan responden terhadap pembinaan OPKB dengan keinginan penduduk untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilihat melalui Tabel 5.28 berikut:



Tabel 5.28 Hubungan Tingkat Perhatian Pemerintah Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Tanggapan Responden Terhadap Pembinaan OPKB Dengan Keinginan Penduduk Untuk Menanggulangi Kemiskinan

X <sub>1</sub> Y	A				B				C				D				Σ
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
A	3 (14,3%)	3 (100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (16,66%)	0	0	0	3 (33,33%)	0	12 (12,5%)
B	6 (100%)	18 (85,7%)	0	0	3 (100%)	0	3 (100%)	0	0	0	21 (87,5%)	3 (16,66%)	0	0	3 (33,33%)	0	57 (59,4%)
C	0	0	0	0	0	0	3 (50%)	6 (100%)	0	0	3 (100%)	12 (66,66%)	0	0	3 (33,33%)	0	27 (28,1%)
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ	9 (100%)	21 (100%)	3 (100%)	0	3 (100%)	0	6 (100%)	6 (100%)	0	24 (100%)	18 (100%)	0	0	0	9 (100%)	0	96 (100%)

Sumber data : Pertanyaan no. 12, 43, dan 46

**Keterangan :**

- X<sub>1</sub> :** Tingkat perhatian pemerintah terhadap program penanggulangan kemiskinan
- A : Pemerintah selalu memberi pengarahannya tentang program penanggulangan kemiskinan
  - B : Pemerintah sering memberi pengarahannya tentang program penanggulangan kemiskinan
  - C : Pemerintah kadang-kadang memberi pengarahannya tentang program penanggulangan kemiskinan
  - D : Pemerintah tidak pernah memberi pengarahannya tentang program penanggulangan kemiskinan
- X<sub>2</sub> :** Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan
- A : Sangat memuaskan
  - B : Memuaskan
  - C : Kurang Memuaskan
  - D : Tidak memuaskan
- Y :** Keinginan penduduk untuk menanggulangi kemiskinan
- A : Sangat berkeinginan
  - B : Berkeinginan
  - C : Kurang berkeinginan
  - D : Tidak berkeinginan

Dari tabel di atas dapat diketabui bahwa dari 96 responden yang diteliti terdapat 42 responden yang menyatakan bahwa pemerintah kadang-kadang memberikan pengarahannya tentang program penanggulangan kemiskinan dan responden

dari 42 responden tersebut di atas merasa puas dengan pembinaan manusia yang dilaksanakan, dimana dari responden tersebut 21 (97,5 % ) responden menyatakan bahwa penyampaian informasi tentang program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah dan bimbingan oleh petugas OPKB menyebabkan keinginan penduduk untuk mengikuti program penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk mengetahui hubungan tingkat pemberian dorongan oleh pemerintah dan bentuk-bentuk pembinaan terhadap keyakinan responden akan peningkatan pendapatan keluarga dapat dilihat pada Tabel 5.29 berikut :

Tabel 5.29 Hubungan Tingkat Pemberian Dorongan Oleh Pemerintah Dan Bentuk-Bentuk Pembinaan Terhadap Keyakinan Responden Akan Peningkatan Pendapatan Keluarga

Y \ X	A				B				C				D				Σ
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
A	0	0	0	0	0	0	3 (100%)	0	9 (15,79)	0	0	0	0	0	0	0	12 (12,5%)
B	3 (100%)	0	0	0	6 (66,67%)	0	0	0	30 (52,66%)	3 (100%)	0	0	15 (100%)	0	3 (100%)	0	60 (62,5%)
C	0	0	0	0	3 (53,33%)	0	0	0	18 (31,58%)	0	3 (100%)	0	0	0	0	0	24 (25%)
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ	3 (100%)	0	0	0	9 (100%)	0	3 (100%)	0	57 (100%)	3 (100%)	3 (100%)	0	15 (100%)	0	3 (100%)	0	96 (100%)

Sumber data: Pertanyaan no. 13, 35, 47

Keterangan :

X<sub>1</sub>: Tingkat Pemberian dorongan oleh pemerintah

- A : Selalu memberi
- B : memberi
- C : Kadang-kadang memberi
- D : Tidak pernah memberi.

X<sub>2</sub>: Bentuk-bentuk Pembinaan

- A : Pemberian pinjaman modal dan penyuluhan tentang suatu usaha.
- B : Penyuluhan tentang suatu usaha
- C : Pemberian pinjaman modal
- D : Lainnya

Y : Keyakinan responden bahwa dengan menanggulangi kemiskinan akan meningkatkan pendapatan keluarga

- A : Sangat Yakin
- B : Yakin
- C : Kurang Yakin
- D : Tidak Yakin

Dari Tabel 5.29 dapat dianalisis bahwa Perumusan Kebijakan dan Pembinaan OPKB dapat diterima dan didukung oleh masyarakat di Kota Semarang. Selanjutnya, pemerintah dalam Pembinaan OPKB perlu ditingkatkan demikian juga kemampuan / motivasi penduduk untuk maju supaya lebih ditingkatkan, lewat keaktifan mereka dalam kegiatan, mengangsur dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyampaian informasi tentang program Pembinaan OPKB oleh pemerintah dan bimbingan oleh petugas OPKB yang dilaksanakan menyebabkan penduduk mempunyai keinginan untuk mengikuti program penanggulangan kemiskinan atau dengan kata lain hal tersebut menimbulkan motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang diteliti terdapat 63 responden yang menyatakan bahwa pemerintah kadang-kadang memberikan dorongan kepada penduduk untuk menanggulangi kemiskinan dan 57 responden dari 63 responden tersebut menyatakan bahwa bentuk-bentuk dari bina usaha yang dilaksanakan yaitu pemberian pinjaman modal dan penyuluhan tentang suatu usaha dimana dari 57 responden tersebut 30 (52,63 %) responden menyatakan bahwa pemberian dorongan oleh pemerintah dan bentuk-bentuk bina usaha yang dilaksanakan mempengaruhi keyakinan responden dengan menanggulangi kemiskinan maka pendapatan keluarga akan meningkat.

### **C Analisis Uji Hipotesis**

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel Variabel dalam penelitian, maka diperlukan uji hipotesis yang telah disusun dalam rancangan penelitian, Uji hipotesis adalah usaha membuktikan dari jawaban sementara suatu fenomena atau variabel penelitian yang telah dirumuskan dalam rancangan penelitian tersebut dan merupakan proses akhir dari suatu penelitian. Melalui pengujian hipotesis yang diteliti dan didukung oleh data yang valid memungkinkan memperoleh suatu jawaban yang benar terhadap variabel yang diteliti.

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu peneliti kemukakan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Ada Pengaruh antara Perumusan Kebijakan terhadap motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi kemiskinan.
2. Ada Pengaruh antara pembinaan OPKB terhadap Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi kemiskinan.
3. Ada Pengaruh antara perumusan kebijakan dan pembinaan OPKB terhadap Motivasi Penduduk Untuk Mengikuti Program penanggulangan kemiskinan.

Dalam melakukan pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan alat statistik, yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel menggunakan koefisien Rank Kendall dan uji signifikansinya menggunakan kurva normal, lalu menggunakan koefisien konkordansi untuk mengetahui hubungan atau pengaruh ketiga variabel dan setelah itu menggunakan Koefisien Karelasi Parsial Kendall untuk mengetahui kemurnian/keaslian hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas dengan variabel terikat dimana satu variabel yang lain dikontrol/dihilangkan, dan yang terakhir, untuk mengetahui seberapa besar sumbangan variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel digunakan koefisien determinasi.

Dari perhitungan (detil perhitungan bisa dilihat pada lampiran) diperoleh harga masing-masing sebagai berikut :

$SX_1Y$	: 385	$TX_2$	: 108
$SX_2Y$	: 780	$TY$	: 234
$SX_1X_2$	: 606	$N$	: 96
$TX_1$	: 54	$S$	: 46640

Adapun pengujian hipotesis melalui beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

## 1. Koefisien Korelasi Rank Kendall

Tujuan penggunaan koefisien korelasi Rank Kendall dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pengaruh antara perumusan kebijakan dan pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang.

- a. Hubungan dua variabel, yaitu antara perumusan kebijakan ( $X_1$ ) terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan ( $Y$ ) di Kota Semarang

$$\begin{aligned}
 TX_1.Y &= \frac{SX_1Y}{\sqrt{0,5..N(N-1) - TX_1} \cdot \sqrt{0,5.N(N-1) - TY}} \\
 &= \frac{385}{\sqrt{0,5..96(96-1) - 54_1} \cdot \sqrt{0,5..96(96-1) - 254}} \\
 &= \frac{385}{\sqrt{1488 - 54_1} \cdot \sqrt{1488 - 234}} \\
 &= \frac{385}{\sqrt{1434_1} \cdot \sqrt{1254}} \\
 &= \frac{385}{1334,1} \\
 &= 0,44
 \end{aligned}$$

Setelah harga  $TX_1Y$  diperoleh, maka langkah selanjutnya menguji tingkat signifikansi, sebagai berikut:

Dimana telah diketahui :

$$TX_1Y = 0,44$$

$$N = 96$$

Maka :



$$\begin{aligned}
Z_h &= \frac{T X_1 Y}{\sqrt{\frac{2(2N + 5)}{9 N(N - 1)}}} \\
&= \frac{0,44}{\sqrt{\frac{2(2.96 + 5)}{9 \cdot 96 \cdot (96 - 1)}}} \\
&= \frac{0,44}{\sqrt{\frac{414}{266784}}} \\
&= \frac{0,44}{\sqrt{0,015}} \\
&= \frac{0,44}{0,1} \\
&= 4,4
\end{aligned}$$

Kemudian harga  $Z$  hitung dikonsultasikan dengan  $Z$  tabel pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%, jika :

$Z_h \geq 1,96$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

$Z_h \leq 1,96$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Berdasarkan hasil pada  $Z_h$  di atas, adalah 4,4 jadi  $H_0$  ditolak karena  $Z_h > Z_t = 4,4 > +1,96$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa hipotesis yang menyatakan "*ada pengaruh perumusan kebijakan terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di kota Semarang*" **DITERIMA.**

**b. Hubungan Dua Variabel Yaitu Antara Pembinaan OPKB ( $X_2$ ) dan Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi kemiskinan**

$$\begin{aligned}
 TX_2Y &= \frac{SX_1Y}{\sqrt{0,5 \cdot N(N-1) - TX_1 \cdot \sqrt{0,5 \cdot N(N-1) - TY}}} \\
 &= \frac{780}{\sqrt{0,5 \cdot 96(96-1) - 108,1 \cdot \sqrt{0,5 \cdot 96(96-1) - 234}}} \\
 &= \frac{780}{\sqrt{1488 - 108,1 \cdot \sqrt{1488 - 234}}} \\
 &= \frac{780}{\sqrt{1380 \cdot \sqrt{1254}}} \\
 &= \frac{780}{1309,8} \\
 &= 0,6
 \end{aligned}$$

Setelah harga  $TX_2Y$  diperoleh, maka langkah selanjutnya menguji tingkat signifikansi, sebagai berikut:

Dimana telah diketahui :

$$TX_1Y = 0,6$$

$$N = 96$$

Maka :

$$\begin{aligned}
 Zh &= \frac{TX_1Y}{\sqrt{\frac{2(2N + 5)}{9N(N-1)}}} \\
 &= \frac{0,6}{\sqrt{\frac{2(2 \cdot 96 + 5)}{9 \cdot 96 \cdot (96 - 1)}}} \\
 &= \frac{0,6}{\sqrt{\frac{414}{26784}}} \\
 &= \frac{0,6}{\sqrt{0,015}} \\
 &= \frac{0,6}{0,1} \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

Kemudian harga  $Z$  hitung dikonsultasikan dengan  $Z$  tabel pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%, jika :

$Z_h \geq 1,96$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

$Z_h \leq 1,96$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Berdasarkan hasil pada  $M$  di atas, adalah 6 jadi  $H_0$  ditolak karena  $Z_h > Z_t = 6 > + 1,96$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya bahwa hipotesa yang menyatakan bahwa "*Ada pengaruh Pembinaan OPKB terhadap Motivasi Penduduk untuk Menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang*" **DITERIMA.**

## 2. Koefisien Konkordansi Kendall

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari  $k$  variabel (lebih dari dua variabel) digunakan Konkordansi Kendall ( $W$ ).

Diketahui :

$S$  : 46640

$K$  : 3

$N$  : 96

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{S}{1/12K(N^3 - N)} \\
 &= \frac{46640}{1/12 \cdot 3(96^3 - 96)} \\
 &= \frac{46640}{(0,75) \cdot (98208)} \\
 &= \frac{46640}{73656} \\
 &= 0,62
 \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa derajat keseragaman antara pengaruh perumusan kebijakan dan Pembinaan OPKB terhadap Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi kemiskinan terdapat 0,62.

Kemudian untuk menguji signifikansinya dapat dicari melalui perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned} X &= k(N - 1).W \\ &= 3(96 - 1).0,63 \\ &= 3(95).0,63 \\ &= 285 \cdot 0,63 \\ &= 179,55 \end{aligned}$$

Nilai kritisnya :

$$\begin{aligned} &= X_{\alpha \text{ df } (k-1)} \\ &= X_{5\% \text{ df } (3-1)} \\ &= X_{5\% \text{ df } 2} \\ &= 5,991. \end{aligned}$$

Setelah diketahui nilai kritisnya ternyata  $H_0$  ditolak karena  $X > X_{\text{tabel}} = 179,55 > 5,991$ .

Ini berarti bahwa variabel perumusan kebijakan dan variabel Pembinaan OPKB berhubungan terhadap variabel Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi kemiskinan, atau dapat dikatakan terdapat kekurangan dalam mempengaruhi variabel Motivasi Penduduk Untuk Mengikuti Program penanggulangan kemiskinan dengan resiko kekeliruan 5%.

Jadi hipotesis yang menyatakan "ada pengaruh perumusan kebijakan dan Pembinaan program OPKB terhadap Motivasi Penduduk Untuk Menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang" **DITERIMA**

### 3. Koefisien korelasi Parsial Kendall

Tujuan penggunaan Koefisien korelasi ini adalah untuk mengetahui kemurnian/keaslian pengaruh/hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat dimana Satu variabel yang lain dikontrol atau dihilangkan sebelum menghitung harga koefisien korelasi dahulu dicari  $TX_1X_2$  sebagai berikut.

$$SX_1X_2 = 606$$

$$TX_1 = 54$$

$$TX_2 = 108$$

$$N = 96$$

$$\begin{aligned} TX_1X_2 &= \frac{SX_1X_2}{\sqrt{0,5N(N-1) - TX_1} \sqrt{0,5N(N-1) - TX_2}} \\ &= \frac{606}{\sqrt{0,5N(N-1) - TX_1} \sqrt{0,5N(N-1) - TX_2}} \\ &= \frac{606}{\sqrt{0,5 \cdot 96(95) - 54} \sqrt{0,5 \cdot 96(95) - 108}} \\ &= \frac{606}{\sqrt{1488 - 54} \sqrt{1488 - 108}} \\ &= \frac{606}{\sqrt{1434} \sqrt{1380}} \\ &= \frac{606}{(65,4)(64,2)} \\ &= \frac{606}{1339,54} \\ &= 0,5 \end{aligned}$$

Kemudian dicari koefisien parsial kendall-nya dimana:

$$TX_1Y = 0,44$$

$$TX_1X_2 = 0,5$$

$$TX_2Y = 0,6$$

$$\begin{aligned}
 TX_1Y.X_2 &= \frac{TX_1Y - (TX_1Y)(TX_1.X_2)}{(1 - (TX_1Y_2) \cdot (1 - (TX_1X_2)^2))} \\
 &= \frac{0,44 - (0,6)(0,5)}{(1 - (0,6)^2(1 - (0,5)^2)} \\
 &= \frac{0,44 - 0,3}{(1 - (0,36) \cdot (1 - (0,25))} \\
 &= \frac{0,14}{0,68} \\
 &= 0,2
 \end{aligned}$$

Denggunakan rumus Z, maka signifikansinya bisa dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Z_h &= \frac{TX_1Y.X_2}{\sqrt{\frac{2(2N + 5)}{9N(N - 1)}}} \\
 &= \frac{0,2}{\sqrt{\frac{2 \cdot (2 \cdot 96 + 5)}{9 \cdot 96 \cdot (96 - 1)}}} \\
 &= \frac{0,2}{\sqrt{\frac{414}{26784}}} \\
 &= \frac{0,2}{0,1} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

Kemudian harga Z hitung dikonsultasikan dengan Z Tabel dengan taraf signifikan 5%. Dan ternyata  $Z_h > 1,96$  sehingga  $H_0$  ditolak.

Hal ini berarti *ada pengaruh perumusan kebijakan terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang.*

$$\begin{aligned}
 TX_2Y.X_1 &= \frac{TX_2Y - (TX_1Y)(TX_1Y_2)}{\sqrt{(1 - (TX_1Y)^2)(1 - (TX_1X_2)^2)}} \\
 &= \frac{0,6 - (0,44)(0,5)}{\sqrt{(1 - (0,44)^2)(1 - (0,5)^2)}} \\
 &= \frac{0,6 - 0,22}{\sqrt{(1 - 0,19)(1 - 0,25)}} \\
 &= \frac{0,38}{\sqrt{0,810,75}} \\
 &= \frac{0,38}{0,60} \\
 &= 0,55
 \end{aligned}$$

Kemudian signifikansinya dengan menggunakan rumus Z :

$$\begin{aligned}
 Z_h &= \frac{0,55}{\sqrt{\frac{2(2.96 + 5)}{9.96(95)}}} \\
 &= \frac{0,55}{\sqrt{\frac{414}{26784}}} \\
 &= \frac{0,55}{\sqrt{0,015}} \\
 &= \frac{0,55}{0,01} \\
 &= 5,5
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diperoleh Z hitung > 1,96

5,5 > 1,96 pada taraf signifikan 5%, jadi  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti hipotesis bahwa ada pengaruh pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang **DITERIMA**.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh kedua variabel independent terhadap satu variabel dependen yaitu :

Diketahui :

$$TX_1Y : 0,44$$

$$TX_2YX_1 : 0,55$$

$$TY(X_1X_2) =$$

$$\begin{aligned} TY.(X_1X_2) &= \sqrt{1-(1-TX_1Y).(1-TX_2YX_1)} \\ &= \sqrt{1-(1-0,44).(1-0,55)} \\ &= \sqrt{1-(0,66).(0,45)} \\ &= \sqrt{1-0,297} \\ &= \sqrt{0,703} \\ &= 0,84 \end{aligned}$$

Maka :

$$\begin{aligned} Z &= \frac{0,84}{\sqrt{\frac{2(2.96 + 5)}{9.96.(95)}}} \\ &= \frac{0,84}{\sqrt{\frac{414}{26784}}} \\ &= \frac{0,84}{0,1} \\ &= 8,4 \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat diketahui Z hasil > 1,96 pada  $\alpha : 5\% = 8,4 > 1,96$ . Dengan demikian dapat diketahui bahwa Ada pengaruh Perumusan kebijakan dan Pembinaan Operasi Pasar Khusus Beras (OPKB) terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan.



#### 4. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

$$TX_1X_2 = 0,5$$

$$TX_1X_2 = 0,84$$

$$\begin{aligned} KD^2 &= (TX_1X_2) + (TX_1X_2Y) \cdot (1 - (TX_1X_2)^2) \\ &= (0,5)^2 + (0,84)(1 - (0,5)^2) \\ &= (0,25) + (0,84)(0,75) \\ &= (0,25) + (0,63) \\ &= (0,25) + (0,63) \\ &= 0,88 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} KD &= \sqrt{0,88 \times 100\%} \\ &= 0,94 \times 100 \% \\ &= 94 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan variabel Perumusan kebijakan dan Pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan secara bersama-sama sebesar 94%, berarti sangat besar, sedangkan 6% mungkin dipengaruhi oleh variabel atau gejala-gejala lain

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan yang telah peneliti uraikan di muka tentang pengaruh perumusan kebijakan pemerintah dan pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan, maka pada bab ini peneliti ingin mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran yang sekiranya berguna bagi peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Semarang di masa yang akan datang.

#### **A. Kesimpulan**

1. Perumusan Kebijakan dari perhitungan proporsi dapat diketahui bahwa proses terbesar dan terkecil membuktikan bahwa aspek perhatian Pemerintah terhadap kebutuhan pokok masyarakat sangat diperhatikan, akan tetapi kurang adanya dukungan faktor-faktor pendorong dalam mempengaruhi penduduk. Sementara dilihat dari analisis tabel silang hubungan Perumusan Kebijakan mengenai OPKB sangat tinggi dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah cukup baik. Maka ada hubungannya. Dan jika dilihat dari uji hipotesis yang digunakan dengan Rang Kendall maka ada pengaruh Perumusan Kebijakan Pemerintah terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang.
2. Pembinaan OPKB dari perhitungan proporsi dapat diketahui bahwa proses terbesar dan terkecil membuktikan bahwa aspek pembinaan yang dilakukan petugas sangat sering dilakukan secara tatap muka/langsung akan tetapi waktu pelaksanaannya/jadwalnya sering tidak tepat waktu. Sementara dari tabel silang dengan adanya pembinaan OPKB akan menyebabkan masyarakat menjadi berkeinginan untuk menanggulangi kemiskinan. Maka ada hubungannya. Dan jika

dilihat dari uji hipotesis yang digunakan dengan Rank Kendall maka ada pengaruh pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang.

3. Motivasi dari perhitungan proporsi dapat diketahui bahwa proses terbesar dan terkecil membuktikan bahwa aspek motivasi penduduk untuk meningkatkan pendapatan keluarga sangat tinggi sedangkan kecenderungan keyakinan masyarakat untuk mengikuti program penanggulangan kemiskinan kurang ada. Sementara dari tabel silang Pemerintah masih memberi dorongan bagi masyarakat untuk mengikuti program penanggulangan kemiskinan. Maka ada hubungannya. Dan jika dilihat dari uji hipotesis yang digunakan dengan Rank Kendall maka ada hubungan pengaruh perumusan Kebijakan Pemerintah dan pembinaan OPKB terhadap motivasi penduduk untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang.

## **B. Saran –Saran**

Setelah peneliti menarik kesimpulan diatas, berikut ini peneliti akan sedikit memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak yang berkaitan langsung. Hal ini bertujuan untuk keberhasilan pembangunan dan kemajuan di Kota Semarang, dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

Adapun saran-saran yang peneliti sampaikan adalah :

1. Perumusan Kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui OPK Beras, perlu ditingkatkan pelaksanaannya sehingga benar-benar dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan rakyat miskin. Dalam rangka upaya faktor-faktor pendorong perlu dipikirkan seperti : bagaimana mendapatkan modal (*how to get*

*the capital*) bagi penduduk miskin, agar mereka lebih mandiri tanpa harus menggantungkan bantuan dari pihak lain.

2. Institusi/Lembaga yang bertindak sebagai pelaksana program OPKB, harus dapat mengembangkan sikap atau budaya kerja yang transparan, akuntabel dan cepat tanggap. Dan juga para aparat pelaksana program OPK Beras, agar berperilaku sesuai dengan pedoman kerja, jangan mencurangi hak rakyat miskin. Sehingga rakyat mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari program yang diluncurkan oleh Pemerintah.
3. Upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia perlu digalakkan seperti memberikan ketrampilan (*skill*) terutama pada penduduk miskin yang tidak terampil. ke tengah-tengah mereka. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, maka menjadi kewajiban Pemerintah untuk menekan kemiskinan. Kesejahteraan haruslah menjadi ukuran yang utama, jauh lebih baik hanya meningkatkan pendapatan penduduk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, Irma and Morris, Cynthia Taff, *Ekonomic Growth and Sosial Equit in Developing Countries*, Stanford University, Little Brown, Boston, 1970.
- Basah Sjacran Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad 21*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997
- Branson, H. Williern and Litvack, M. James, *Macro economics*, New York: Harper & Row, Publishers, second edition, 1981
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Ekonomi Pembangunan*, PT Pembangunan, Jakarta, 1965.
- Gillis, Malcom, *Economics of Development*, New York: W.W. Norton Company, Third Edition, 1992
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987
- Hatta, Muhammad, *Ekonomi dan Masyarakat*, FEUI, Jakarta, 1956.
- Hess, Peter and Ross, Peter, *Development Economics : Theories, evidence, and policies*, the Dryden Press Harcourt Brace College Publisher
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977
- Mankiw, N. Gregory, *Macro Ekonomi*, New York: Worth Publishers, 4<sup>th</sup> edition, 1997.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, P. Tarsito, 1988.
- Nawawan, Hadani, *Metode Penelitian Bidang Sisiologi*, Yogyakarta, UGM, Perss, 1991.
- Romer, David, *Advanced Macro Economics*, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996
- Santoso, Edi, *Paradigma Otonomi*, Semarang, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Cv Alfabeta, 1998.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983

Suryarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, **Metode Penelitian Survey**, Edisi revisi, Jakarta, LP3ES, 1989.

Turnovsky, J. Stephen, *Macroeconomic Analysis and Stabilization policy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981

-----, *The 1971 Election In Indonesia: and East Java Case Study*, Clay ton, Victoria, Monash University, 1974.

Weber, Max, *Theory of Social and Economic Organization*, diterjemahkan A.M. Henderson dan disuting Talcott Parsons, New York, 1947.

## **NON BUKU**

**Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara, BP-7 Pusat 1998**

**Undang – Undang No. 22 Tahun 1999, Pemerintahan Daerah**

**Kamus Besar Bahasa Indonesia, Team Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990**

**Badan Pusat Statistik, Buletin Ringkas BPS, Maret 1999**

**Surat Kabar : Jawa Pos, Harian Kompas, Suara Merdeka**

**Penjelasan UU no. 5 Tahun 1974**

**Penjelasan UU no. 22 Tahun 1999 tentang, Pemerintah Daerah**